

# ANALISIS KOMODITAS PANGAN STRATEGIS TAHUN 2023

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian 2023

# ANALISIS KOMODITAS PANGAN STRATEGIS TAHUN 2023

Volume 1 Tahun 2023

**Ukuran Buku**: 10,12 inci x 7,17 inci (B5)

Jumlah Halaman: 87 halaman

#### Penasehat:

Roby Darmawan, M. Eng

## Penyunting:

Mas'ud, SE, M.Si Sri Wahyuningsih, S.Si

#### Naskah:

Sehusman,SP
Ir. Sabarella, M.Si
Ir. Wieta B Komalasari, M.Si
Megawati Manurung, SP
Yani Supriyati, SE
Rinawati, SE
Karlina Seran, S.Si
Maidiah Dwi Naruri Saida, S.Si
Vira Desita Amara, Amd

# **Design Sampul:**

Rinawati, SE

Diterbitkan oleh : Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian 2023

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

#### **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga publikasi "Analisis Komoditas Pangan Strategis Tahun 2023" telah diselesaikan. Publikasi ini merupakan salah satu output dari Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian dalam mengemban visi dan misinya dalam mempublikasikan data sektor pertanian maupun hasil analisisnya.

Publikasi Analisis Komoditas Pangan Strategis Tahun 2023 disusun berdasarkan data dan informasi data sekunder yang bersumber dari instansi terkait baik di lingkup Kementerian Pertanian maupun di luar Kementerian Pertanian seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Bulog serta dari website GFSI (Global Food Security Index) dan Food and Agriculture Organization (FAO).

Penyajian analisis meliputi keragaan penyusun aspek komoditas pangan strategis diantaranya pola panen dan produksi padi serta provinsi sentra produksi komoditas pangan, stok pangan, konsumsi, pengeluaran untuk konsumsi, kemiskinan, ketidakcukupan pangan dan indikator lainnya selama 3 sampai 5 tahun terakhir serta dilengkapi dengan analisis *import dependency ratio* (IDR) dan *self sufficiency ratio* (SSR) komoditas pangan, analisis neraca penyediaan dan kebutuhan pangan, serta analisis komoditas pangan strategis lainnya.

Publikasi ini disajikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dapat diakses melalui *website* Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian yaitu <a href="https://satudata.pertanian.go.id">https://satudata.pertanian.go.id</a>. Dengan terbitnya publikasi ini diharapkan para pembaca dapat memperoleh gambaran perkembangan komoditas pangan strategis secara lengkap.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan publikasi ini, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan dan perbaikan publikasi berikutnya.

Jakarta, Desember 2023 Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian,

Roby Darmawap, M.Eng **W**\_NIP. 196912151991011001

# **DAFTAR ISI**

	Hala	man
KATA PE	ENGANTAR	V
DAFTAR	ISI	vii
DAFTAR	TABEL	ix
DAFTAR	GAMBAR	хi
BAB I.	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Tujuan	2
BAB II.	METODOLOGI	3
	2.1. Sumber Data dan Informasi	3
	2.2. Metode Analisis	3
BAB III.	. GAMBARAN UMUM ASPEK KOMODITAS PANGAN	
	STRATEGIS	5
	3.1. Aspek Ketersediaan Pangan	5
	3.2. Aspek Keterjangkauan Pangan	17
	3.3. Aspek Kualitas dan Keamanan Pangan	43
BAB IV.	ANALISIS KOMODITAS PANGAN STRATEGIS	51
	4.1. Neraca Penyediaan dan Kebutuhan Pangan	51
	4.2. Indeks Ketahanan Pangan	61
	4.3. Global Food Security Index (GFSI)	67
BAB V.	KESIMPULAN	79
DAFTAR	PUSTAKA	87

# **DAFTAR TABEL**

	Halan	nan
Tabel 3.1.1a.	Provinsi Sentra Produksi Beberapa Komoditas Pangan	
	Utama, 2022	9
Tabel 3.1.1b.	Provinsi Sentra Produksi Beberapa Komoditas Sayuran dan	
	Tebu, 2022	9
Tabel 3.1.1c.	Provinsi Sentra Produksi Beberapa Komoditas Peternakan dan	
	Kelapa Sawit, 2022	10
Tabel 3.1.2.	Import Dependency Ratio (IDR) dan Self Sufficiency Ratio	
	(SSR) Beras, 2020 – 2022	15
Tabel 3.1.3.	Import Dependency Ratio (IDR) dan Self Sufficiency Ratio	
	(SSR) Pangan Lainnya, 2020 – 2022	16
Tabel 3.2.1.	Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Bahan Makanan di	
	Wilayah Perkotaan dan Perdesaan, 2018 – 2022	19
Tabel 3.2.2.	Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Bahan Makanan di	
	Wilayah Perkotaan, 2018 – 2022	21
Tabel 3.2.3.	Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Bahan Makanan di	
	Wilayah Perdesaan, 2018 – 2022	22
Tabel 3.2.4.	Tingkat Partisipasi Beberapa Bahan Makanan, 2018 – 2022	25
Tabel 3.2.5.	Pengeluaran untuk Makanan menurut Provinsi, 2018 – 2022	30
Tabel 3.2.6.	Persentase Pengeluaran untuk Makanan menurut Provinsi, 201	18
	– 2022	32
Tabel 3.2.7.	Jumlah Penduduk Miskin menurut Provinsi, 2019 – 2023	34
Tabel 3.2.8.	Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi, 2019 – 2023.	36
Tabel 3.2.9.	Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Perkotaan menurut	
	Provinsi, 2019 – 2023	37
Tahel 3 2 10	Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Perdesaan menurut	

	Provinsi, 2019 – 2023	38
Tabel 3.2.11.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurut.Provinsi, 2022 –	
	2023	41
Tabel 3.2.12.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurut .Provinsi, 2022 –	
	2023	42
Tabel 3.3.1.	Konsumsi Energi dan Protein Penduduk Indonesia,	
	2020 – 2022	43
Tabel 3.3.2.	Konsumsi Energi dan Skor Pola Pangan Harapan Indonesia	
	Menurut Kelompok Pangan, 2020 – 2022	45
Tabel 3.3.3.	Prevelansi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan per Provinsi,	
	2020 – 2022	48
Tabel 3.3.4.	Perkembangan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (FIES)	
	Menurut Provinsi, 2020 – 2022	50
Tabel 4.1.1.	Realisasi dan Prognosa Neraca Penyediaan dan Kebutuhan	
	Beras, Januari – Desember 2023	52
Tabel 4.1.2.	Realisasi dan Prognosa Neraca Penyediaan dan Kebutuhan	
	Jagung dan Kedelai, Januari – Desember 2023	53
Tabel 4.1.3.	Realisasi dan Prognosa Neraca Penyediaan dan Kebutuhan	
	Bawang Merah dan Bawang Putih, Januari – Desember 2023 .	.54
Tabel 4.1.4.	Neraca Penyediaan dan Kebutuhan Cabe Besar dan Cabe Raw	it,
	Januari – Desember 2023	56
Tabel 4.1.5.	Neraca Penyediaan dan Kebutuhan Gula dan Minyak Goreng,	
	Januari – Desember 2023	58
Tabel 4.1.6.	Neraca Penyediaan dan Kebutuhan Daging Sapi/Kerbau, Dagir	ng
	Ayam Ras dan Telur Ayam Ras, Januari – Desember 2023	59
Tabel 4.2.1.	Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Provinsi,	
	2020 - 2022	62
Tabel 4.2.2.	Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten,	
	2020 - 2022	65

Tabel 4.2.3.	Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Kota,	
	2020 - 2022	65
Tabel 4.3.1.	Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Indonesia	
	berdasarkan Global Food Security Index, 2018 - 2022	69
Tabel 4.3.2.	Indeks Ketahanan Pangan Negara di Dunia, 2018 - 2022	71
Tabel 4.3.3.	Global Food Security Index Negara di Dunia, 2022	73
Tabel 4.3.4.	Indeks Ketahanan Pangan Negara di Asia Pasifik,	
	2018 - 2022	75
Tabel 4.3.5.	Global Food Security Index Negara di Asia Pasifik, 2022	77

# **DAFTAR GAMBAR**

	Halan	nan
Gambar 3.1.1.	Pola Panen Padi di Indonesia, 2020 – 2022	6
Gambar 3.1.2.	Provinsi Sentra Produksi Padi di Indonesia, 2020 – 2022	7
Gambar 3.1.3.	Pengelompokan Provinsi berdasarkan Produksi Padi	8
Gambar 3.1.4.	Sebaran Stok Beras Menurut Periode dan Institusi, SCBN 2022	12
Gambar 3.1.5.	Rata – Rata Sebaran Stok Beras, SCBN 2022	12
Gambar 3.1.6. Gambar 3.2.1.	Sebaran Stok Beras di Bulog, Januari 2020–Oktober 2023 Pola Pengeluaran per Kapita Sebulan di Wilayah Perkotaan dan Perdesaan, 2022	14 18
Gambar 3.2.2.	Pola Pengeluaran Bahan Makanan per Kapita Sebulan di Wilayah Perkotaan + Perdesaan, 2022	20
Gambar 3.2.3.	Perkembangan Pola Pengeluaran menurut Kelompok Bahan Makanan di Wilayah Perkotaan dan Perdesaan, 2022	23
Gambar 3.2.4.	Pola Pengeluaran Bahan Makanan per Kapita Sebulan di Wilayah Perkotaan dan Perdesaan, 2020	24
Gambar 3.2.5.	Boxplot Persentase Pengeluaran untuk Makanan menurut Provinsi, 2018 - 2022	27
Gambar 3.2.6.	Boxplot Pengeluaran untuk Makanan Provinsi, 2018 - 2022	29
Gambar 3.2.7.	Boxplot Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Perkotaan, Perdesaan dan Total menurut Provinsi, 2019 - 2023	39
Gambar 3.3.1.	Rata – Rata Konsumsi Energi dan Protein per Provinsi, 2022	44
Gambar 3.3.2.	Perkembangan Kerawanan Pangan (PoU) Sedang dan Bera (FIES) di Indonesia, 2020 - 2022	t 46
Gambar 4.1.1.	Neraca Penyediaan dan Kebutuhan Beras, Januari – Desember 2023	52

Gambar 4.1.2.	Neraca Penyediaan dan Kebutuhan Cabe Besar dan Cabe Rawit, Januari-Juli 2022	55
Gambar 4.1.3.	Neraca Penyediaan dan Kebutuhan Gula, Minyak Goreng, Daging Sapi, Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras, 2023	57
Gambar 4.2.1.	Boxplot Skor Indeks Ketahanan Pangan Provinsi, 2020 - 2022	63
Gambar 4.2.2.	Pengelompokan Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Berdasarkan Kemiripan, 2020-2022	64
Gambar 4.2.3.	Sepuluh Peringkat Pertama dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten, 2020 - 2022	65
Gambar 4.2.4.	Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Kota, 2020 - 2022	67
Gambar 4.3.1.	Skor Indeks Ketahanan Pangan Indonesia berdasarkan <i>Glo Food Security Index</i> , 2018 - 2022	
Gambar 4.3.2.	Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Negara di Dunia, 2021 - 2022	72
Gambar 4.3.3.	Global Food Security Index Negara di Dunis, 2022	73
Gambar 4.3.4.	Pengelompokan Indeks Ketahanan Pangan Global Negara di Asia Pasifik, 2018 - 2022	76
Gambar 4.3.5.	Global Food Security Index Negara di Asia Pasifik, 2022	77

# **BAB I. PENDAHULUAN**

#### 1.1. Latar Belakang

Sesuai Undang-Undang Ketahanan Pangan No.18 tahun 2012, bahwa ketahanan pangan adalah "kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Ketahanan pangan nasional masih menjadi isu yang penting bagi Indonesia mengingat kecukupan produksi, distribusi, dan konsumsi pangan memiliki dimensi yang terkait dengan dimensi sosial, ekonomi, dan politik. Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang terdiri atas berbagai subsistem. Subsistem utamanya meliputi **ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, serta kualitas dan keamanan pangan.** Terwujudnya ketahanan pangan merupakan sinergi dari interaksi ketiga sub sistem tersebut.

Produksi dan ketersediaan pangan merupakan kemampuan masyarakat dan negara dalam menyediakan pangan dari produksi domestik maupun dari luar negeri (impor). Ketersediaan pangan yang cukup di tingkat nasional atau wilayah adalah unsur penting dalam membangun ketahanan pangan. Namun demikian ketersediaan pangan yang cukup di tingkat nasional dan provinsi tidak secara otomatis menjamin ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga dan individu. Pangan dapat tersedia dan diakses secara fisik namun bila sebagian anggota rumah tangga tidak mendapat manfaat secara maksimal karena masalah distribusi pangan, baik jumlah maupun keragaman yang

disebabkan kondisi tubuh tidak dapat menyerap pangan karena sakit maupun penyiapan pangan yang kurang tepat. Untuk mendapatkan gambaran yang komperhensif terkait ketahanan pangan tersebut, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian sebagai instansi penyedia data dan informasi di lingkup Kementerian Pertanian, pada tahun 2023 telah melakukan analisis komoditas pangan strategis yang bersumber dari data sekunder berbagai sumber dengan menggunakan berbagai indikator aspek penyusun ketahanan pangan.

#### 1.2. Tujuan

Tujuan disusunnya analisis komoditas pangan strategis adalah untuk melakukan kajian terhadap:

- a. Perkembangan aspek ketersediaan, keterjangkauan, serta kualitas dan keamanan pangan masyarakat Indonesia, 2020 – 2022/2023
- Analisis komoditas pangan strategis dari berbagai indikator baik secara nasional maupun posisi Indonesia dibandingkan negara lainnya.

# **BAB II. METODOLOGI**

#### 2.1. Sumber Data dan Informasi

Analisis komoditas pangan strategis ini disusun berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari data sekunder yang bersumber dari instansi terkait baik di lingkup Kementerian Pertanian maupun di luar Kementerian Pertanian seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional (BAPANAS), Bulog serta dari website GFSI (Global Food Security Index) dan Food and Agriculture Organization (FAO).

#### 2.2. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penyusunan analisis komoditas pangan strategis adalah sebagai berikut :

# A. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan analisis keragaan diantaranya dengan menampilkan nilai rata-rata pertumbuhan per tahun, rata-rata dan persen kontribusi (*share*) yang mencakup indikator penyusun ketahanan pangan meliputi aspek ketersediaan, keterjangkauan serta kualitas dan keamanan pangan. Indikator yang dimaksud meliputi data produksi, ekspor, impor, stok, harga, konsumsi, pengeluaran, kemiskinan dan lainnya. Penyajian analisis berupa tabel maupun visualisasi grafik/gambar berupa grafik batang, boxplot, *pie chart*, histogram dan lainnya.

#### B. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif yang digunakan dalam analisis komoditas pangan strategis antara lain :

# √ Import Dependency Ratio (IDR)

Import Dependency Ratio (IDR) merupakan formula yang menyediakan informasi ketergantungan suatu negara terhadap impor suatu komoditas. Nilai IDR dihitung berdasarkan definisi yang dibangun oleh FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations).

Perhitungan nilai IDR tidak termasuk perubahan stok dikarenakan besarnya stok (baik dari impor maupun produksi domestik) tidak diketahui.

$$IDR = \underline{Impor}$$
 X 100  
(Produksi + impor – ekspor)

# √ Self Sufficiency Ratio (SSR)

Nilai SSR menunjukkan besarnya produksi dalam kaitannya dengan kebutuhan dalam negeri. SSR diformulasikan sbb.:

$$SSR = \frac{Produksi}{(Produksi + impor - ekspor)} X 100$$

# ✓ Neraca Pangan

Ketersediaan= Stok awal + Produksi

Kebutuhan = (konsumsi per kapita (Susenas) X Jumlah Penduduk) +
Konsumsi di luar rumah tangga + konsumsi lainnya

Neraca Pangan (surplus/defisit) = Ketersediaan - Kebutuhan

# BAB III. GAMBARAN UMUM ASPEK PANGAN STRATEGIS

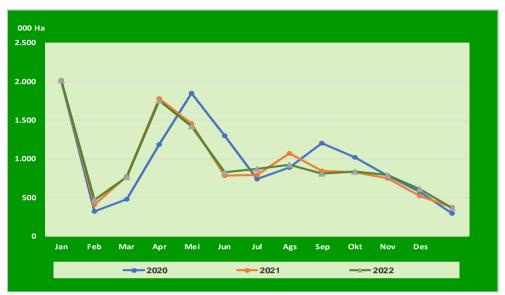
#### 3.1. Aspek Ketersediaan Pangan

Aspek ketersediaan mencakup produksi, stok serta keseimbangan antara impor dan ekspor pangan. Ketersediaan pangan harus dikelola sedemikian rupa sehingga meskipun produksi pangan bersifat musiman, terbatas dan tersebar antar wilayah, tetapi volume pangan yang tersedia bagi masyarakat harus cukup jumlah dan jenisnya serta stabil penyediaannya sesuai permintaan dari waktu ke waktu.

#### 3.1.1. Pola Panen dan Produksi

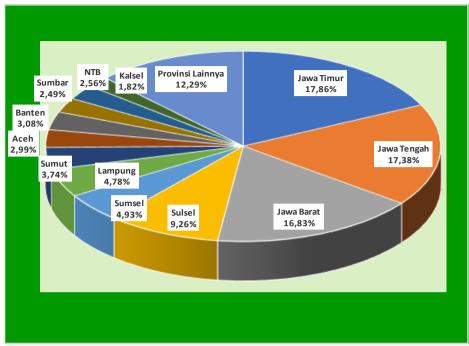
Pemenuhan konsumsi pangan terutama beras, sebagai bahan makanan utama sekaligus sumber nutrisi penting dalam struktur pangan melalui aspek penyediaan menjadi hal yang sangat penting, mengingat jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya. Padi dibudidayakan hampir di semua provinsi di Indonesia sepanjang tahun tanpa mengenal musim khususnya untuk lahan sawah dengan irigasi yang bagus. Hal ini ditunjukkan dengan pola panen bulanan padi di Indonesia terjadi sepanjang tahun seperti yang tersaji pada Gambar 3.1.1. Berdasarkan data hasil Kerangka Survei Area (KSA) padi oleh BPS tahun 2020 sampai 2022, luas panen padi di Indonesia cenderung menurun sebesar 0,96% per tahun atau menjadi 10,45 juta hektar tahun 2022. Secara umum, puncak panen padi di Indonesia terjadi pada bulan Maret pada tahun 2021 dan 2022, namun di tahun 2020 puncak panen bergeser pada April dengan luas panen sekitar 1,8 juta hektar. Puncak panen pada Maret 2021 lebih tinggi 1,48% dibandingkan 2022 atau menjadi 1,79 juta ha. Sementara puncak panen April 2020 lebih tinggi 4,83% dibandingkan Maret 2021 atau menjadi 1,86 juta ha. Selain pada bulan tersebut, puncak panen kedua

terjadi pada Juli untuk tahun 2021 dan 2022 serta Agustus 2020, dan selanjutnya luas panen makin berkurang sampai awal tahun berikutnya.



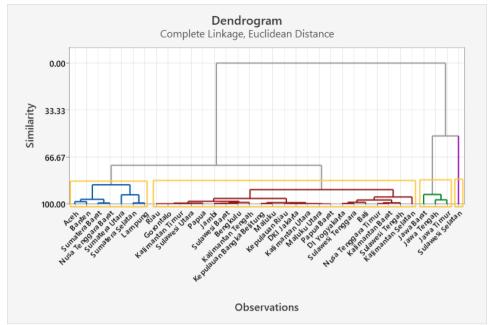
Gambar 3.1.1. Pola Panen Padi di Indonesia, 2020 - 2022

Sejalan dengan luas panen padi, perkembangan produksi padi dalam wujud gabah kering giling (GKG) tahun 2020 sampai 2022 juga cenderung fluktuatif yaitu 54,6 juta ton tahun 2020 kemudian sedikit meningkat menjadi 54,65 juta ton tahun 2021 dan menurun menjadi 54,42 juta ton tahun 2021. Hampir 88% produksi padi di Indonesia disumbang oleh 12 provinsi sentra. Provinsi sentra produksi padi didominasi oleh Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan yang masingmasing memberikan kontribusi sebesar 17,86% (setara 9,75 juta ton GKG), 17,38% (9,49 juta ton GKG), 16,83% (9,19 juta ton GKG), dan Sulawesi Selatan sebesar 9,26% (5,06 juta ton GKG). Sementara provinsi-provinsi lainnya hanya berkontribusi masing-masing kurang dari 5% (Gambar 3.1.2).



Gambar 3.1.2. Provinsi Sentra Produksi Padi di Indonesia, 2020 - 2022

Bila dilakukan pengelompokan provinsi berdasarkan produksi padi, terdapat 4 kelompok berdasarkan kemiripan produksinya. Pada tahun 2020-2023, kelompok 1 atau produksi kategori rendah terdapat 22 provinsi dengan angka produksi diantara 423 ton sampai dengan 812 ribu ton, berikutnya kelompok 2 atau produksi dengan kategori sedang terdapat 8 provinsi dengan produksi 835 ribu ton sampai 2,76 juta ton, di kelompok 3 atau produksi dengan kategori tinggi terdapat 1 provinsi yakni Provinsi Sulawesi Selatan dengan produksi 4,94 juta ton di tahun 2022, dan di kelompok 4 atau produksi dengan kategori paling tinggi terdapat 3 provinsi yakni Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat dengan angka produksi diantara 9,16 juta ton sampai 9,94 juta ton seperti tersaji pada Gambar 3.1.3.



Gambar 3.1.3. Pengelompokan Provinsi berdasarkan Produksi Padi, 2020-2023

Selanjutnya untuk produksi pangan lainnya, tahun 2022 terdapat 15 provinsi sentra dengan share diatas 80% terhadap produksi nasional, bahkan untuk tebu mencapai 97,35% dengan provinsi hanya 8 (delapan) provinsi sentra sentra, bawang putih sebesar 94,61% dengan dan tebu seperti tersaji pada Tabel 3.1.1a dan Tabel 3.1.1b. Sentra produksi komoditas jagung, kedelai, ubi kayu dan ubi jalar masih didominasi oleh provinsi di wilayah Jawa yaitu provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, begitu juga komoditas komoditas cabe merah, cabe rawit, bawang merah dan bawang putih didominasi 2 provinsi utama yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat tahun 2022 masing-masing 70,7% dan 15,57%. Sementara sentra produksi tebu disumbang oleh 2 provinsi utama yaitu Jawa Timur dan Lampung secara kumulatif mencapai 79,71%.

Tabel 3.1.1a. Provinsi Sentra Produksi Beberapa Komoditas tanaman Pangan, 2022

	Pangan, 2022										
No.	Descripsi	Jagun	g <sup>1)</sup>	Kede	ele <sup>1)</sup>	Ubi Ka	yu <sup>1)</sup>	Ubi Ja	alar <sup>1)</sup>		
NO.	Provinsi	Provinsi 2022 Share (%)		2022*)	2022*) Share (%) 2022**) S		Share (%)	2022**)	Share (%)		
1	Sumatera Utara	1.768.649	7,91	9.712	3	878.767	5,87	87.269	5,77		
2	Sumatera Barat	770.306	3,45	19,80	0,01	154.378	1,03	122.575	8,10		
3	Riau	1.018	0,00	333,89	0,11	68.841	0,46	3.946	0,26		
4	Sumatera Selatan	622.685	2,79	215,96	0,07	305.092	2,04	24.964	1,65		
5	Lampung	1.952.103	8,73	2.594,95	0,86	5.952.537	39,74	24.423	1,61		
6	Jawa Barat	983.518	4,40	48.780,89	16,18	1.034.950	6,91	307.690	20,33		
7	Jawa Tengah	2.879.883	12,88	65.910,57	21,86	2.482.939	16,58	143.601	9,49		
8	Jawa Timur	6.699.479	29,97	84.536,71	28,03	1.434.699	9,58	287.809	19,02		
9	Banten	12.990	0,06	5.940,87	1,97	52.418	0,35	13.792	0,91		
10	Nusa Tenggara Barat	1.923.461	8,60	19.430,42	6,44	39.218	0,26	13.144	0,87		
11	Kalimantan Barat	97.014	0,43	284,53	0,09	155.424	1,04	21.321	1,41		
12	Kalimantan Tengah	48.609	0,22	17,91	0,01	65.150	0,43	5.618	0,37		
13	Kalimantan Timur	23.058	0,10	44,01	0,01	57.860	0,39	13.290	0,88		
14	Sulawesi Utara	160.985	0,72	8,89	0,00	45.746	0,31	18.244	1,21		
15	Sulawesi Selatan	1.558.417	6,97	5.887,65	1,95	273.846	1,83	60.056	3,97		
	Provinsi lainnya	2.854.578	13	57.858	19	1.976.447	13	365.569	24		
Indo	nesia	22.356.753	100,00	301.576,82	100,00	14.978.310	100,00	1.513.311	100,00		
Shar	e Kumulatif 15 Provi	nsi	87,23		80,81		86,80		75,84		

Sumber : Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik dan Dinas Pertanian seluruh Indonesia

Keterangan : 1) Kualitas produksi jagung pipilan kering , kedelai biji kering, ubi kayu dan ubi jalar umbi basah,

Tabel 3.1.1b. Provinsi Sentra Produksi Beberapa Komoditas Sayuran dan Tebu, 2022

		i CDu,	, 2022								
No.	Provinsi	Cabe I	Cabe Merah		Rawit	Bawang	Bawang Merah		g Putih	Tebu <sup>1)</sup>	
NO.	Provinsi	2022	Share (%)	2022	Share (%)	2022	Share (%)	2022	Share (%)	2022*)	Share (%)
1	Sumatera Utara	211.746,69	14,35	79.101,97	5,63	64.834,92	3,27	20,50	0,07	27.645	1,15
2	Sumatera Barat	123.503,52	8,37	24.232,53	1,73	207.375,83	10,46	790,71	2,59	-	-
3	Riau	13.104,55	0,89	6.753,42	0,48	195,31	0,01	0,00	0,00	-	-
4	Sumatera Selatan	25.497,33	1,73	8.600,59	0,61	1.129,89	0,06	467,00	1,53	110.710	4,60
5	Lampung	29.634,75	2,01	10.175,78	0,72	1.726,66	0,09	3,00	0,01	723.707	30,08
6	Jawa Barat	357.695,45	24,24	135.502,86	9,65	193.318,33	9,75	416,50	1,36	45.092	1,87
7	Jawa Tengah	186.721,90	12,65	220.275,61	15,69	556.509,80	28,07	21.620,23	70,70	203.573	8,46
8	Jawa Timur	116.175,24	7,87	587.945,65	41,88	478.393,29	24,13	854,54	2,79	1.194.035	49,63
9	Banten	6.763,33	0,46	3.554,33	0,25	1.372,39	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Nusa Tenggara Barat	21.659,40	1,47	45.525,79	3,24	201.155,22	10,15	4.761,35	15,57	11.502	0,48
11	Kalimantan Barat	3.323,60	0,23	5.629,66	0,40	44,04	0,00	0,00	0,00	-	-
12	Kalimantan Tengah	1.289,93	0,09	4.926,43	0,35	111,81	0,01	0,00	0,00	-	-
13	Kalimantan Timur	5.732,38	0,39	7.070,78	0,50	114,46	0,01	0,00	0,00	-	-
14	Sulawesi Utara	7.183,47	0,49	17.278,38	1,23	5.019,63	0,25	0,00	0,00	-	-
15	Sulawesi Selatan	16.670,82	1,13	21.601,31	1,54	175.159,91	8,84	1,40	0,00	25.977	1,08
	Provinsi lainnya	349.119	24	225.862	16	95.899	5	1.647	5,39	63.666	3
Indo	nesia	1.475.821	100,00	1.404.037	100,00	1.982.360	100,00	30.582	100,00	2.405.907	100
Shar	e Kumulatif 15 Provinsi		76,34		83,91		95,16		94,61		97,35

Sumber : Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik dan Dinas Pertanian seluruh Indonesia

Keterangan : 1) Tebu wujud produksi gula kristal putih/hablur

\*) Angka sementara

<sup>\*)</sup> Produksi kedele berdasarkan angka estimasi dari Direktorat Aneka Kacang dan Umbi

<sup>\*\*)</sup> Produksi ubikayu dan ubi jalar berdasarkan angka PDPS-Pusdatin

Sentra produksi daging sapi, daging ayam ras, daging ayam buras dan telur ayam juga dominan disumbang oleh provinsi di wilayah Jawa. Sementara provinsi sentra kelapa sawit berada di 2 pulau yaitu pulau Sumatera dan Kalimantan, yaitu Provinsi Riau, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur yang mendominasi produksi kelapa sawit Indonesia dengan kontribusi masing-masing sebesar 19,68%, 15,45%, 13,14%, 11,93%, 9% dan 7,5% seperti tersaji pada Tabel 3.1.1c.

Tabel 3.1.1c. Provinsi Sentra Produksi Beberapa Komoditas Peternakan dan Kelapa Sawit 2022

	dan Kelapa Sawit, 2022										
No.	Provinsi	Kelapa Sa	wit <sup>1)</sup>	Dagin	g Sapi	Daging A	Daging Ayam Ras		am Buras	as Telur Ayam Ras petelur	
NO.	Provinsi	2022*)	Share (%)	2022*)	Share (%)	2022*)	Share (%)	2022*)	Share (%)	2022*)	Share (%)
1	Sumatera Utara	5.988.099	13,14	13.859	2,78	193.126	5,13	16.954	5,98	584.728	10,50
2	Sumatera Barat	1.359.299	2,98	21.515	4,31	43.780	1,16	5.489	1,94	389.414	7,00
3	Riau	8.969.588	19,68	9.128	1,83	104.331	2,77	1.511	0,53	2.381	0,04
4	Sumatera Selatan	4.101.776	9,00	15.459	3,10	123.690	3,28	7.620	2,69	229.673	4,13
5	Lampung	450.169	0,99	21.176	4,24	123.198	3,27	15.248	5,38	213.206	3,83
6	Jawa Barat	29.882	0,07	84.961	17,03	733.982	19,49	27.857	9,83	699.384	12,56
7	Jawa Tengah	-	-	61.394	12,31	742.948	19,73	25.359	8,95	827.712	14,87
8	Jawa Timur	-	-	110.991	22,25	586.703	15,58	41.555	14,67	1.314.115	23,61
9	Banten	25.294	0,06	17.243	3,46	195.902	5,20	4.624	1,63	318.552	5,72
10	Nusa Tenggara Barat	-	-	11.159	2,24	36.982	0,98	12.677	4,48	40.155	0,72
11	Kalimantan Barat	5.439.654	11,93	5.096	1,02	57.312	1,52	3.484	1,23	70.236	1,26
12	Kalimantan Tengah	7.043.151	15,45	4.114	0,82	47.606	1,26	2.641	0,93	3.051	0,05
13	Kalimantan Timur	3.420.649	7,50	7.466	1,50	85.909	2,28	5.484	1,94	29.052	0,52
14	Sulawesi Utara	-	-	3.169	0,64	13.942	0,37	3.009	1,06	30.761	0,55
15	Sulawesi Selatan	114.297	0,25	16.278	3,26	132.353	3,51	5.591	1,97	188.248	3,38
	Provinsi lainnya	8.639.035	19	95.917	19	543.809	14	104.191	37	625.672	11
Indo	nesia	45.580.892	100,00	498.923	100,00	3.765.573,10	100,00	283.291,67	100,00	5.566.339,44	100,00
Shar	e Kumulatif 15 Provins	i	81,05		80,78		85,56		63,22		88,76

Sumber : Ditjen Perkebunan serta Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

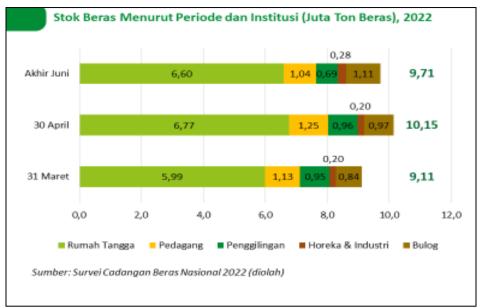
Keterangan : \*) Angka Sementara

1) Wujud produksi minyak sawit

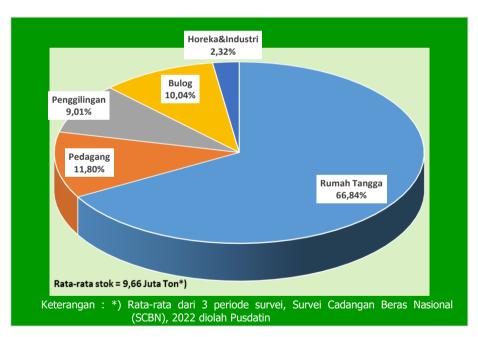
## 3.1.2. Stok Beras dan Pangan Strategis

Pengelolaan stok atau cadangan pangan bertujuan untuk mengantisipasi dan menangani masalah pangan, terutama untuk menjamin ketersediaan pangan dalam jumlah yang mencukupi, terdistribusi secara merata sepanjang waktu dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Menurut UU No.18 tahun 2012 tentang Pangan disebutkan bahwa stok/cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan di pemerintah dan masyarakat. Stok pangan merupakan jumlah pangan yang disimpan sebagai cadangan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Berdasarkan hasil Survei Cadangan Beras Nasional (SCBN) tahun 2022 yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian bekerjasama dengan BPS dengan melakukan survei pada 3 periode yaitu tanggal 31 Maret, 30 April dan Akhir Juni 2022 dengan jumlah stok beras sebesar 9,11 juta ton (31 Maret), 10,15 juta ton (30 April) dan 9,71 juta ton (akhir Juni 2022). Urutan institusi yang menyimpan stok beras terbesar berada di rumah tangga (produsen dan konsumen), disusul kemudian di pedagang beras, Bulog, penggilingan dan di hotel, restoran dan catering (horeka) & Industri (Gambar 3.1.4). Sebaran stok beras tersebut, menunjukkan bahwa stok beras sebagian besar berada di masyarakat dengan lokasi stok beras utamanya adalah di rumah tangga produsen atau petani di susul kemudian di pedagang beras dan penggilingan, sementara stok beras di pemerintah berada di Bulog.



Gambar 3.1.4. Sebaran Stok Beras Menurut Periode dan Institusi, SCBN 2022



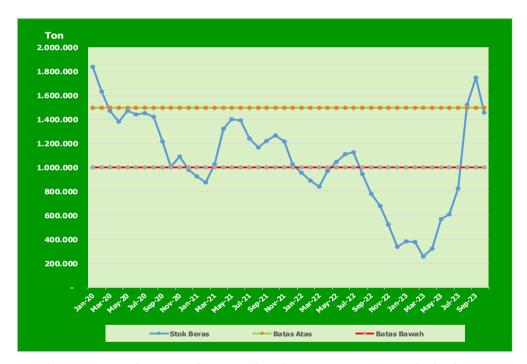
Gambar 3.1.5. Rata - Rata Sebaran Stok Beras, SCBN 2022

Rata-rata stok beras pada 3 (tiga) periode tersebut sebesar 9,66 juta ton, dengan sebaran stok di rumah tangga (produsen dan konsumen) sebesar 66,82%, disusul di pedagang 11,8%, di Bulog 10,04%, penggilingan 9,03%, horeka dan industri sebesar 2,32%, seperti tersaji dalam Gambar 3.1.5.

Bila kita cermati lebih rinci, besarnya stok di rumah tangga produsen dan konsumen tersebut, sebagian besar stok berada di rumah tangga produsen atau petani mencapai lebih dari 92% dan sebagian besar berupa gabah/GKG dan sisanya di rumah tangga konsumen berupa wujud beras. Besarnya rata-rata stok gabah per rumah tangga produsen sebesar 390 - 443 kg dan rata-rata stok beras di rumah tangga konsumen sekitar 9-10 kg.

Sementara stok beras di pemerintah adalah stok beras yang berada di Bulog yang tersebar di 26 Kantor Wilayah (Kanwil) di seluruh Indonesia. Pada Gambar 3.1.6 terlihat pada awal tahun 2020 yakni Januari sd. Februari 2020 rata-rata stok beras berada di atas 1,5 juta ton, selanjutnya terlihat mulai Maret 2020 atau awal terjadinya masa Pandemi Covid-19 di Indonesia sampai dengan saat ini stok beras di Bulog memiliki pola stok pada 1 juta ton sampai dengan dibawah 1,5 juta ton dan saat ini posisi tersebut dianggap sebagai stok aman beras di Bulog. Meskipun sempat terjadi stok kurang dari 1 juta yaitu Desember 2020 sd Februari 2021 dan Januari sd April 2022 serta Agustus 2022 dan posisi Oktober 2022 menjadi sebesar 677.486 ton dan selanjutnya makin menurun hingga Maret 2023 menjadi stok beras terendah di Bulog hanya 256.510 ton, namun kemudian meningkat kembali hingga akhirnya pada September 2023 normal kembali bahkan mencapai 1,75 juta ton. Terjadinya penurunan stok di Bulog mulai akhir tahun 2022 menjadikan Indonesia melakukan impor beras sampai akhir tahun 2023 sebesar 2 juta ton.

Beberapa alasan mengapa dilakukan impor beras tersebut yaitu Besarnya stok di Bulog saat ini masih aman meskipun di bawah 1 juta ton diduga karena Bulog mulai tahun 2019 tidak lagi memiliki program penyaluran beras seperti Raskin, dan Rastra, namun pada masa Pandemi Covid-19 yang terjadi mulai Maret 2020, Bulog telah diberi tugas melalui penyaluran program bantuan sosial akibat Pandemi covid 19 bekerjasama dengan Kementerian Sosial, sehingga stok berasnya terlihat menurun atau terjadi pengeluaran stok berasnya.



Gambar 3.1.6. Sebaran Stok Beras di Bulog, Januari 2020 s.d Oktober 2023

# 3.1.3. Import Dependency Ratio (IDR) dan Self Sufficiency Ratio (SSR) Komoditas Pangan

Import Dependency Ratio (IDR) menggambarkan ketergantungan suatu negara terhadap impor suatu komoditas. Berdasarkan atas perhitungan nilai IDR beras seperti tersaji pada Tabel 3.1.2. menunjukkan pada periode tahun 2020 – 2022 supply beras Indonesia tergantung pada beras impor sangat kecil hanya 1,01% sampai 1,21%. Ketergantungan pada beras impor masih sangat kecil dan beras yang diimpor merupakan beras khusus seperti beras Japonika maupun basmati.

Tabel 3.1.2. Import Dependency Ratio (IDR) dan Self Sufficiency Ratio (SSR) Beras. 2020 - 2022

No	Urajan	Tahun (Ton)						
NO	Uraian	2020	2021	2022				
1	Produksi							
	- Gabah	54.649.202	54.415.294	54.748.977				
	- Beras	34.986.419	34.836.671	35.050.295				
2	Ekspor	366,16057	3.262	2.979				
3	Impor	356.286	407.741	429.207				
4	Produksi + Impor - Ekspor	35.342.339	35.241.151	35.476.523				
5	IDR (%)	1,01	1,16	1,21				
6	SSR (%)	98,99	98,85	98,80				

Sumber : BPS diolah Pusdatin

Keterangan: Produksi gabah merupakan angka KSA, BPS

Konversi GKG ke beras sebesar 64,02% (SKGB, 2018)

Kode HS ekspor impor beras yang digunakan merupakan total beras dikurangi produk turunan beras

Sementara, nilai *Self Sufficiency Ratio (SSR) beras* menunjukkan besarnya produksi beras dalam negeri kaitannya dengan kebutuhan beras untuk memenuhi konsumsi beras masyarakat. Nilai SSR komoditas beras Indonesia dari tahun 2020 hingga 2022 mendekati 99% yang berarti bahwa sebagian besar kebutuhan beras Indonesia dapat dipenuhi oleh produksi domestik yang berarti Indonesia telah mencapai swasembada beras.

Selanjutnya terkait IDR dan SSR untuk komoditas pangan lainnya tahun 2020 - 2022 seperti tersaji dalam Tabel 3.1.3. menunjukkan terdapat 2 (dua) komoditas pangan utama yang memiliki nilai ketergantungan impor (IDR) relatif tinggi yaitu kedelai sekitar 88% - 92% dan gula yang digunakan untuk bahan baku industri, sedangkan ketergantungan terhadap daging sapi impor sekitar 27% - 32%. Kedelai sebagai bahan baku pada industri tahu, tempe dan kecap memiliki nilai IDR yang cukup besar mencapai 88%-92% yang berarti ketergantungan Indonesia sebesar 88%-92% terhadap kedelai impor untuk memenuhi kebutuhan kedelai dalam negeri dan sisanya dipenuhi dari kedelai lokal. Demikian juga pemenuhan kebutuhan gula yang utamanya dalam wujud raw sugar digunakan oleh industri makanan dan minuman memiliki nilai IDR sebesar 72%-75% dan sisanya dipenuhi dari gula lokal. Pemenuhan kebutuhan komoditas pangan utama lainnya seperti jagung (utama sebagai bahan pakan ternak), cabe, bawang merah, daging ayam dan telur ayam dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri yang ditunjukkan dari nilai SSR mendekati 100%.

Tabel 3.1.3. *Import Dependency Ratio (IDR) dan Self Sufficiency Ratio (SSR)* Pangan Lainnya. 2020 - 2022

No.	Komoditas		IDR (%)		SSR (%)			
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	
1	Jagung	4,73	5,20	4,70	95,62	94,81	96,00	
2	Kedelai	89,58	92,20	88,90	10,52	7,88	11,53	
3	Cabe Merah	2,78	3,98	3,77	98,01	96,73	96,82	
4	Bawang Merah	0,05	0,04	0,05	100,42	100,17	100,07	
5	Gula	72,65	73,38	75,02	27,94	31,46	30,04	
6	Daging Sapi	27,31	30,56	31,44	72,70	69,45	68,57	
7	Daging Ayam	0,002	0,002	0,001	100,01	100,00	100,01	
8	Telur Ayam	0,02	0,02	0,02	99,99	99,98	100,00	

Sumber: BPS dan Kementerian Pertanian diolah Pusdatin

Keterangan: ekspor dan impor jagung dan kedelai dalam wujud segar

### 3.2. Perkembangan Aspek Keterjangkauan Pangan

Keterjangkauan pangan adalah salah satu aspek penting dalam keberlanjutan sistem pangan dan kesejahteraan masyarakat. Aspek keterjangkauan pangan mencakup sejumlah faktor yang memengaruhi kemampuan individu atau rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah dan mutu yang cukup, tanpa mengorbankan kebutuhan dasar lainnya. Titik berat aspek ini adalah pada tercapainya pemerataan distribusi pangan dari provinsi yang surplus ke wilayah yang defisit. BPS dalam menghitung Indeks Ketahanan Pangan, untuk aspek keterjangkauan fisik, ekonomi, dan sosial didasarkan pada tiga indikator yaitu indikator pangan yang diproduksi di kecamatan, indikator tidak mengalami kesulitan menjangkau pembelian serta indikator harga pembelian tidak tinggi.

Ada beberapa indikator yang dapat menggambarkan keberhasilan aspek keterjangkauan pangan ini, yaitu dengan melihat bagaimana pendapatan masyarakatnya, kemudian seperti apa pola konsumsinya dan terakhir bagaimana tingkat kemiskinan di semua wilayah. Analisis dalam subbab ini akan mengulas secara deskriptif bagaimana capaian aspek keterjangkauan pangan dilihat dari pendapatan yang akan didekati dari pengeluaran untuk makanan per kapita, konsumsi pangan dan angka dan indeks kemiskinan.

# 3.2.1. Pengeluaran dan Konsumsi

Pengeluaran per kapita masyarakat dari hasil Susenas BPS dibedakan menjadi pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Analisis dalam subbab ini akan melihat pola pengeluaran makanan per kapita dalam sebulan. Ada 14 kelompok bahan makanan yang ditampilkan yaitu padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayur-

sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, bahan minuman, bumbu-bumbuan, konsumsi lainnya, makanan dan minuman jadi serta tembakau dan sirih. Pengeluaran untuk bahan makanan di wilayah perkotaan dan perdesaan tahun 2022 adalah sekitar 50,14% dari total pengeluaran per kapita dalam sebulan (Gambar 3.2.1).



Gambar 3.2.1. Pola Pengeluaran per Kapita Sebulan di Wilayah Perkotaan dan Perdesaan, 2022

Pengeluaran untuk bahan makanan ini secara total untuk wilayah perkotaan dan perdesaan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 665.757,- (tabel 3.2.1). Pengeluaran ini meningkat 6,89% dari tahun 2021. Laju peningkatan tertinggi adalah pada kelompok minyak dan kelapa yaitu sebesar 34,80%. Sementara terendah pada kelompok telur dan susu yaitu 0,71%. Pengeluaran untuk semua jenis bahan makanan ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021. Kelompok bahan makanan lainnya yang mengalami kenaikan cukup tinggi adalah daging (19,45%), buah-buahan (17,10%) dan umbi-umbian (10,15%). Kenaikan pengeluaran

untuk makanan dan minuman jadi di tahun 2022 ini walaupun relatif rendah sekitar 5,04%, menunjukkan daya beli yang membaik di tahun 2022. Hal tersebut karena tahun 2021 pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi turun jika dibandingkan tahun 2020.

Tabel 3.2.1. Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Bahan Makanan di Wilayah Perkotaan dan Perdesaan, 2018 – 2022

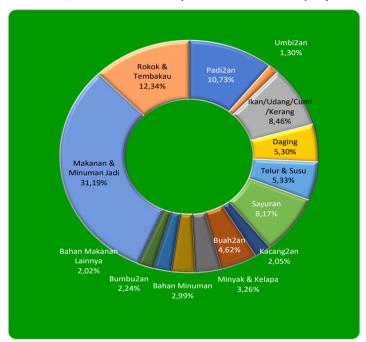
(Rupiah)

No.	Bahan Makanan		Pertumb.				
NO.	banan wakanan	2018	2019	2020	2021	2022	2021-2022 (%)
1	Padi-padian	66.936	64.961	66.789	69.786	71.442	2,37
2	Umbi-umbian	5.623	5.886	6.361	7.841	8.637	10,15
3	Ikan/Udang/Cumi/Kerang	43.352	45.304	46.570	51.514	56.328	9,35
4	Daging	23.006	24.783	26.441	29.539	35.284	19,45
5	Telur dan Susu	32.196	32.435	34.860	35.241	35.491	0,71
6	Sayur-sayuran	39.664	37.898	45.393	53.864	54.367	0,93
7	Kacang-kacangan	11.292	11.273	11.654	13.075	13.660	4,47
8	Buah-buahan	28.486	27.444	30.116	26.240	30.727	17,10
9	Minyak dan Kelapa	13.527	13.211	14.155	16.111	21.717	34,80
10	Bahan Minuman	17.162	16.823	18.337	19.464	19.908	2,28
11	Bumbu-bumbuan	10.755	10.830	11.810	13.593	14.946	9,95
12	Bahan Makanan Lainnya	10.238	10.061	10.574	12.314	13.416	8,95
13	Makanan dan Minuman Jadi	189.223	201.107	206.736	197.682	207.650	5,04
14	Rokok dan Tembakau	65.439	70.537	73.442	76.583	82.183	7,31
	Jumlah Makanan	556.899	572.551	603.236	622.845	665.757	6,89

Sumber: diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret - BPS

Tahun 2022, pangsa pengeluaran terbesar untuk bahan makanan adalah kelompok makanan dan minuman jadi sebesar 31,19% dari total pengeluaran untuk makanan. Pangsa terkecil adalah umbi-umbian yang hanya 1,30% saja dari total pengeluaran untuk makanan. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam gambar ini adalah pengeluaran untuk tembakau

dan sirih yang mencapai 12,34% dan menjadi pengeluaran terbesar kedua setelah makanan dan minuman jadi. Sementara pangsa pengeluaran untuk padi-padian yang merupakan makanan pokok menempati urutan ketiga yaitu sebesar 10,73%. Pangsa pengeluaran untuk ikan dan sayuran relatif tinggi dengan persentase sekitar 8%. Sementara pengeluaran lainnya sekitar 5% atau kurang, di antaranya telur dan susu 5,33%, daging 5,30% dan buah-buahan 4,62% serta kelompok makanan lainnya (Gambar 3.2.2).



Gambar 3.2.2. Pola Pengeluaran Bahan Makanan per Kapita Sebulan di Wilayah Perkotaan dan Perdesaan, Tahun 2022

Pola pengeluaran bahan makanan pada Gambar 3.2.2 secara tidak langsung dapat menggambarkan kondisi ketahanan pangan suatu wilayah. Dalam masyarakat modern saat ini, konsumsi makanan dan minuman jadi menjadi penciri yang utama. Banyaknya restoran siap saji bahkan sampai ke pelosok perdesaan mengakibatkan tingkat konsumsinya menjadi tinggi dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Keluarga modern saat ini cenderung ingin serba praktis dan meninggalkan kebiasaan memasak di

rumah. Hal ini terutama karena tuntutan kehidupan yang ada dimana banyak ibu bekerja lebih memilih membeli makanan siap saji.

Untuk melihat situasi ketahanan pangan suatu wilayah maka konsumsi pangan pokok akan dapat tergambar dalam pangsa pengeluaran komoditas pangan yang relatif tinggi. Pada Gambar 3.2.2 dimana pangsa pengeluaran untuk rokok yang lebih tinggi dari pangan pokok dapat menjadi pengingat bagi semua pihak dalam memperbaiki kondisi sosial masyarakat yang secara tidak langsung akan berdampak pada situasi ketahanan pangannya.

Tabel 3.2.2. Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Bahan Makanan di Wilayah Perkotaan, 2018 – 2022

(Rupiah) Perkotaan Pertumb. No. Bahan Makanan 2021-2022 2019 2018 2020 2021 2022 (%) Padi-padian 1 60.785 59.291 61.026 65.058 67.200 3.29 2 Umbi-umbian 4.954 5.156 5.709 6.715 7.495 11,62 3 Ikan/Udang/Cumi/Kerang 46.753 48.782 50.046 54.559 59.898 9,79 4 Daging 28.297 29.670 31.346 34.129 41.242 20,84 5 Telur dan Susu 39.021 42.026 42.111 42.297 39.670 0,44 Sayur-sayuran 40.522 38.316 46.252 54.678 55.679 1,83 7 Kacang-kacangan 11.966 12.006 12.350 13.994 14.743 5,35 8 Buah-buahan 34.908 30.832 34.018 31.979 35.233 14,27 9 Minyak dan Kelapa 13.227 13.076 13.812 15.785 21.638 37,08 10 Bahan Minuman 16.621 17.781 18.846 16.381 19.551 3,74 11 Bumbu-bumbuan 11.251 11.146 12.261 14.102 15.723 11,49 12 Bahan Makanan Lainnya 10.910 10.735 11.384 13.285 14.594 9,85 13 Makanan dan Minuman Jadi 237.325 251.129 257.945 242.214 246.924 1.94 14 Rokok dan Tembakau 64.663 70.444 73.457 74.970 78.867 5,20 Jumlah Makanan 637.132 670.304 681.278 721.084 620.962 5,84

Sumber : diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret - BPS

Tabel 3.2.2 menyajikan perkembangan pengeluaran untuk konsumsi bahan makanan di perkotaan tahun 2018 – 2022. Tahun 2022 pengeluaran untuk total bahan makanan di wilayah perkotaan adalah

sebesar Rp 721.084. Pengeluaran ini cenderung meningkat setiap tahunnya seiring dengan naiknya inflasi yang berimbas kepada harga bahan makanan. Sementara di wilayah perdesaan pengeluaran untuk bahan makanan adalah sekitar Rp 591.087,- dengan kecenderungan yang juga meningkat setiap tahunnya (Tabel 3.2.3). Pengeluaran untuk bahan makanan di perkotaan ini sekitar 20% lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan. Laju pertumbuhan pengeluaran untuk makanan setahun terakhir di wilayah perdesaan cenderung lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Hal ini mengindikasikan inflasi perdesaan yang cenderung lebih tinggi dibandingkan perkotaan.

Tabel 3.2.3. Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Bahan Makanan di Wilayah Perdesaan, 2018 – 2022

(Rupiah)

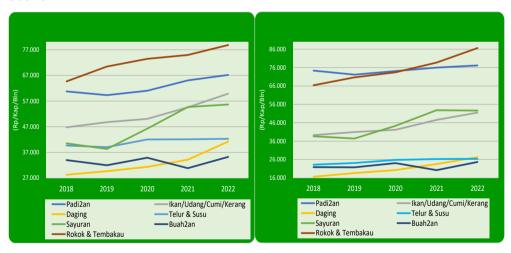
				D 1	_		Pertumb.
No.	Bahan Makanan			Perdesaaı	1		2021-2022
140.	Danan Makanan	2018	2019	2020	2021	2022	(%)
1	Padi-padian	74.362	72.142	74.107	76.008	77.167	1,52
2	Umbi-umbian	6.430	6.811	7.189	9.323	10.178	9,17
3	Ikan/Udang/Cumi/Kerang	39.246	40.898	42.156	47.505	51.512	8,43
4	Daging	16.617	18.592	20.211	23.498	27.243	15,94
5	Telur dan Susu	23.174	24.093	25.761	26.200	26.305	0,40
6	Sayur-sayuran	38.628	37.369	44.303	52.793	52.598	-0,37
7	Kacang-kacangan	10.478	10.344	10.770	11.865	12.199	2,82
8	Buah-buahan	21.808	21.701	24.031	20.197	24.646	22,03
9	Minyak dan Kelapa	13.890	13.381	14.591	16.539	21.824	31,95
10	Bahan Minuman	17.815	17.383	19.042	20.278	20.389	0,55
11	Bumbu-bumbuan	10.157	10.430	11.236	12.923	13.898	7,54
12	Bahan Makanan Lainnya	9.427	9.206	9.545	11.036	11.825	7,15
13	Makanan dan Minuman Jadi	131.149	137.750	141.710	139.073	154.644	11,20
14	Rokok dan Tembakau	66.376	70.654	73.422	78.705	86.659	10,11
	Jumlah Makanan	479.557	490.754	518.073	545.942	591.087	8,27

Sumber: diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret - BPS

Jika data pengeluaran untuk bahan makanan ini disandingkan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, ada beberapa perbedaan yang

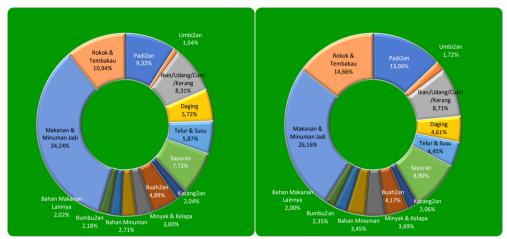
sangat nyata dan menarik untuk dicermati. Dalam grafik ini pengeluaran yang disajikan adalah komoditas pertanian dengan pangsa yang relatif besar yaitu padi-padian, ikan, daging, telur susu, sayuran dan buahbuahan. Pengeluaran untuk tembakau dan sirih sengaja ditambahkan untuk melihat keragaannya. Gambar 3.2.3 terlihat bahwa di wilayah perkotaan pengeluaran untuk tembakau dan sirih menduduki peringkat pertama, sementara di perdesaan kelompok padi-padian berada pada urutan pengeluaran teratas kecuali tahun 2021-2022 terjadi pergeseran.

Pengeluaran untuk makanan di perkotaan cenderung merata untuk semua bahan makanan ini dengan terlihat garis yang ada tidak mengelompok secara tegas atau cukup menyebar. Sementara di perdesaan pengeluaran untuk makanan cenderung mengelompok menjadi 3 yaitu kelompok atas untuk padi-padian dan rokok, kelompok tengah untuk ikan dan sayuran, dan kelompok bawah untuk daging, telur susu dan buah-buahan.



Gambar 3.2.3. Perkembangan Pola Pengeluaran menurut Kelompok Bahan Makanan di Wilayah Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2022

Kelompok ikan dan sayuran baik di perkotaan dan perdesaan menempati peringkat yang sama, namun di perkotaan pengeluaran untuk telur dan susu juga seimbang. Pengeluaran untuk telur dan susu di perdesaan cenderung lebih rendah dan hampir sama dengan pengeluaran untuk daging serta buah-buahan. Hal ini mengindikasikan peluang perbaikan konsumsi di perdesaan dapat diarahkan kepada konsumsi telur dan susu serta buah-buahan. Kemampuan wilayah perdesaan untuk dapat mencukupi telur, susu dan buah-buahan sangat besar untuk dapat ditingkatkan.



Gambar 3.2.4. Pola Pengeluaran Bahan Makanan per Kapita Sebulan di Wilayah Perkotaan dan Perdesaan, Tahun 2022

Konsumsi buah-buahan dan sayuran di perkotaan juga dapat ditingkatkan untuk memperbaiki pola konsumsi yang lebih sehat. Jika dilihat pada grafik tersebut pola konsumsi perkotaan cenderung tinggi protein dimana pengeluaran untuk ikan, telur dan susu berada pada urutan atas. Pengeluaran untuk daging di wilayah perkotaan relatif rendah, diperkirakan karena masyarakat perkotaan mengkonsumsi daging dalam bentuk siap saji sehingga pengeluarannya masuk ke dalam pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi (Gambar 3.2.4).

Jika dilihat angka partisipasi konsumsi beberapa bahan makanan tahun 2022, beras sebagai pangan pokok dikonsumsi oleh 98,86% masyarakat. Tingkat partisipasi pangan pokok sumber karbohidrat lainnya seperti singkong, ubi jalar dan kentang berturut-turut adalah 28,21%,

14,19% dan 32,05%. Jagung basah dengan kulit atau biasa disebut jagung muda dalam kelompok padi-padian tingkat partisipasi konsumsinya sekitar 11,19%. Konsumsi tepung terigu juga cukup tinggi yaitu 36,19% dan ini belum termasuk konsumsi mie yang bahan bakunya tepung terigu juga (Tabel 3.2.4).

Tabel 3.2.4. Tingkat Partisipasi Beberapa Bahan Makanan, 2018 - 2022

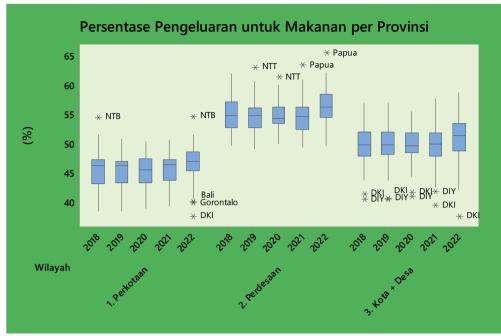
No.	Jenis Komoditas	duk Indon	esia (%)			
NO.	Jenis Komoditas	2018	2019	2020	2021	2022
1	Padi-padian					
	Beras	96,97	96,82	96,95	97,66	98,86
	Jagung basah dengan kulit	9,26	11,9	15,07	11,4	11,19
	Tepung terigu	34,35	34,03	33,62	36,41	36,19
2	Umbi-umbian					
	Ketela pohon/singkong	22,34	21,55	24	30,17	28,21
	Ketela rambat/ubi jalar	11,73	12,25	12,27	15,44	14,19
	Kentang	23,56	27,66	26,72	28,42	32,05
3	Daging					
	Daging sapi	6,76	7,17	6,99	6,63	7,76
	Daging ayam ras	46,73	48,82	50,43	52,48	58,72
4	Telur dan Susu					
	Telur ayam ras	83,18	85,28	86,94	87,18	89,23
	Susu kental manis	25,42	22,5	22,01	22,17	23,17
	Susu bubuk	10,18	10,35	10,28	9,23	8,46
5	Sayur-sayuran					
	Bawang merah	90,05	90,39	90,87	91,65	94,95
	Bawang putih	86,65	87,56	87,88	89,2	91,79
	Cabai merah	54,04	56,19	54,31	53,7	56,55
	Cabai rawit	70,45	71,81	72,98	72,89	75,77
6	Kacang-Kacangan					
	Tahu	72,95	73,59	74,03	74,94	76,21
	Tempe	75,06	75,41	75,61	76,28	77,68
7	Buah-Buahan					
	Jeruk, jeruk bali	24,09	32,02	25,19	30,68	36,94
	Salak	14,51	12,16	11	11,84	16,52
8	Minyak dan Kelapa					
	Minyak Kelapa	8,17	7,24	6,33	7,09	3,61
	Minyak Goreng (kelapa sawit, bunga matahari)	87,14	87,98	89,08	89,21	93,67
	Kelapa (tidak termasuk santan instan)	26,61	26,25	25,61	24,79	22,01
9	Bahan Minuman					
	Gula Pasir	89,18	89,99	90,07	90,82	92,3
	Gula Merah, gula air	19,83	19,94	20,24	21,09	20,59
10	Bumbu-bumbuan					
	Garam	94,51	94,4	94,61	95,52	96,37
	Kecap	56,9	55,8	56,69	57,46	59,08

Sumber: Susenas Maret, BPS

Sumber protein hewani yang banyak dikonsumsi masyarakat adalah telur ayam ras dengan tingkat partisipasi konsumsi 89,23%, sementara daging ayam sekitar 58,72%. Daging sapi tingkat partisipasi konsumsinya relatif masih rendah yaitu 7,76%. Susu yang banyak dikonsumsi sebagai sumber protein lainnya adalah susu kental manis yang secara medis tidak terlalu baik untuk kesehatan, sebesar 23,17%. Susu bubuk pabrikan juga relatif tinggi tingkat partisipasi konsumsinya yaitu sekitar 8,46%.

Kedelai yang termasuk kelompok kacang-kacangan banyak dikonsumsi dalam bentuk tahu dan tempe sebagai pangan tradisonal Indonesia, dengan tingkat partisipasi konsumsinya masing-masing sebesar 76,21% dan 77,68%. Bahan pangan lainnya dengan tingkat partisipasi konsumsi yang tinggi adalah minyak goreng sawit (93,67%), gula pasir (92,3%) dan garam (96,37%). Bawang dan cabai sebagai pelengkap masakan masuk ke dalam kelompok sayur-sayuran, tingkat partisipasi konsumsinya di atas 90% untuk bawang dan di atas 50% untuk cabai. Sementara tingkat konsumsi buah-buahan yang relatif tinggi dalam kelompoknya adalah jeruk (36,94%). Secara lengkap tingkat partisipasi konsumsi bahan pangan ini dapat dilihat pada Tabel 3.2.4.

Hal yang perlu menjadi perhatian adalah pencapaian ketahanan pangan juga perlu didukung dengan peningkatan kualitas dari sisi kandungan gizi untuk bahan pangan yang dikonsumsi. Komposisi nilai gizi yang lengkap serta keamanan pangan menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Penganekaragaman pangan perlu dikembangkan supaya komoditas substitusi dan komplementer dapat lebih dikembangkan sehingga masyarakat mendapatkan nutrisi yang cukup dan seimbang.



Gambar 3.2.5. Boxplot Persentase Pengeluaran untuk Makanan Menurut Provinsi, 2018 – 2022

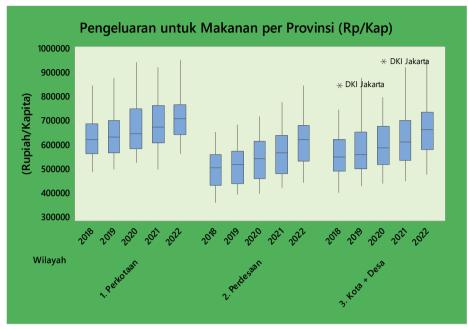
Jika pengeluaran untuk makanan ini dicermati menurut provinsi maka dapat dilihat provinsi mana yang tingkat pengeluaran untuk makanannya tertinggi dan terendah. Gambar 3.2.5 menunjukkan grafik boxplot persentase pengeluaran untuk makanan dibandingkan total pengeluaran di 34 provinsi. Untuk wilayah perkotaan, DKI Jakarta, Bali dan Gorontalo merupakan daerah dengan persentase pengeluaran untuk makanannya di tahun 2022 relatif rendah jika dibandingkan dengan provinsi lain. Untuk total wilayah perkotaan + perdesaan DKI juga merupakan pencilan bawah bersama DI Yogyakarta pada periode 2018 – 2022.

Pengeluaran untuk makanan dapat menjadi indikator kesejahteraan suatu daerah. Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi

penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Tingkat kesejahteraan ini juga berdampak pada kondisi ketahanan pangannya.

Provinsi Nusa Tenggara Barat di wilayah perkotaan merupakan provinsi dengan pengeluaran untuk makanan relatif tinggi dibandingkan provinsi lain. Tahun 2022 bahkan Nusa Tenggara Barat merupakan pencilan atas untuk wilayah perkotaannya, dimana persentase pengeluaran untuk makanannya sebesar 54,85% dari total pengeluaran. Sementara untuk wilayah perdesaan, Nusa Tenggara Timur dan Papua merupakan pencilan tinggi di tahun 2019 – 2022. Namun secara total perkotaan dan perdesaan, baik Nusa Tenggara Barat maupun Nusa Tenggara Timur tidak masuk ke dalam kategori ekstrim atau pencilan atas (Gambar 3.2.5).



Gambar 3.2.6. Boxplot Pengeluaran untuk Makanan menurut Provinsi, 2018 – 2022

Jika dilihat nilai absolutnya untuk pengeluaran per kapita selama sebulan, seluruh provinsi cenderung stabil dengan laju meningkat. Di wilayah perkotaan atau perdesaan tidak ada provinsi dengan data yang ekstrim dibandingkan provinsi lainnya. Namun jika dilihat total perkotaan dan perdesaan, DKI Jakarta merupakan provinsi yang cukup ekstrim tinggi dibandingkan provinsi lain (Gambar 3.2.6). Pengeluaran per kapita dalam sebulan untuk makanan di DKI Jakarta pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 953.321,- naik 3,18% dibandingkan tahun 2021 (Tabel 3.2.5).

Tabel 3.2.5. Pengeluaran untuk Makanan menurut Provinsi, 2018 – 2022

(Rupiah)

			(Rupiah)				
			Perkot	aan+Perd	esaan		Pertumb.
No.	Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022	2021-2022 (%)
1	Aceh	547.668	559.303	595.635	643.591	668.481	3,87
2	Sumatera Utara	554.754	576.349	598.245	607.812	663.927	9,23
3	Sumatera Barat	604.871	609.232	644.853	668.029	716.262	7,22
4	Riau	599.873	621.802	668.074	672.143	730.826	8,73
5	Jambi	555.989	560.577	590.173	613.753	663.021	8,03
6	Sumatera Selatan	503.297	498.969	535.136	579.032	620.732	7,20
7	Bengkulu	548.879	542.474	573.500	580.273	626.209	7,92
8	Lampung	478.452	484.765	503.976	539.964	575.673	6,61
9	Kepulauan Bangka Belitung	710.401	751.665	771.121	783.204	881.622	12,57
10	Kepulauan Riau	747.944	789.143	800.424	828.206	846.222	2,18
11	DKI Jakarta	847.847	877.538	944.687	923.933	953.321	3,18
12	Jawa Barat	600.967	629.765	655.838	677.383	708.390	4,58
13	Jawa Tengah	460.891	469.403	496.173	519.009	572.808	10,37
14	DI Yogyakarta	529.012	546.474	579.279	594.622	628.845	5,76
15	Jawa Timur	502.761	502.857	521.577	557.791	600.848	7,72
16	Banten	672.918	702.350	756.673	744.893	830.111	11,44
17	Bali	599.976	609.238	675.146	628.472	609.855	-2,96
18	Nusa Tenggara Barat	525.091	539.844	574.202	637.898	666.966	4,56
19	Nusa Tenggara Timur	402.922	429.471	442.700	468.252	480.749	2,67
20	Kalimantan Barat	535.534	561.144	584.259	603.291	666.066	10,41
21	Kalimantan Tengah	632.493	650.809	675.948	713.145	762.634	6,94
22	Kalimantan Selatan	626.241	628.932	675.979	701.228	727.961	3,81
23	Kalimantan Timur	702.905	724.379	790.469	736.465	813.448	10,45
24	Kalimantan Utara	671.612	717.782	743.894	742.834	758.431	2,10
25	Sulawesi Utara	560.514	568.026	590.062	612.972	674.114	9,97
26	Sulawesi Tengah	474.811	505.591	516.839	512.309	561.739	9,65
27	Sulawesi Selatan	495.465	487.898	516.183	533.482	566.224	6,14
28	Sulawesi Tenggara	457.497	475.206	506.740	509.723	535.048	4,97
29	Gorontalo	423.926	452.994	476.069	529.729	534.461	0,89
30	Sulawesi Barat	433.929	445.400	457.059	453.031	491.876	8,57
31	Maluku	491.426	507.233	532.135	536.327	589.485	9,91
32	Maluku Utara	502.810	514.276	537.605	556.903	585.162	5,07
33	Papua Barat	614.330	667.696	687.944	698.303	723.855	3,66
34	Papua	623.987	665.301	723.821	792.781	858.106	8,24
	INDONESIA	556.899	572.551	603.236	622.845	665.757	6,89

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret - BPS

Provinsi dengan pengeluaran untuk makanan terendah adalah provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Rp. 480.749,- atau naik 2,67% dibandingkan tahun 2021. Hal yang perlu dicermati di sini adalah pertumbuhan atau laju kenaikan pengeluaran dibandingkan tahun sebelumnya. Provinsi Babel merupakan provinsi dengan laju kenaikan tertinggi yaitu sekitar 12,57% dibandingkan tahun sebelumnya. Provinsi lainnya dengan laju kenaikan pengeluaran relatif tinggi di atas 10% adalah Jawa Tengah, Banten, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur (Tabel 3.2.5).

Besar pengeluaran suatu daerah biasanya berbanding lurus dengan tingkat biaya hidupnya. Provinsi dengan total pengeluaran tertinggi baik untuk makanan dan bukan makanan adalah DKI Jakarta yaitu Rp. 2.525.347,- per kapita sebulan. Sementara NTT merupakan provinsi dengan total pengeluaran terendah yaitu Rp. 884.102,- per kapita sebulan. Besar pengeluaran ini cenderung naik setiap tahunnya karena inflasi yang terjadi. Naiknya pengeluaran untuk makanan karena naiknya harga pangan akan membawa dampak pada inflasi yang cukup tinggi. Harga pangan yang tinggi sangat mempengaruhi aspek keterjangkauan dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Tingkat kesejahteraan secara teori dapat dilihat dari pangsa pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluarannya. Suatu daerah dianggap lebih baik kesejahteraannya jika pengeluaran untuk makanannya cenderung rendah. DKI Jakarta sebagai provinsi dengan total pengeluaran tertinggi, ternyata pangsa pengeluaran untuk makanannya merupakan yang terendah dibandingkan provinsi lainnya. Tahun 2022 pangsa pengeluaran untuk makanan di DKI Jakarta hanya 37,75% saja dari total pengeluaran. Sementara pangsa pengeluaran untuk makanan yang tertinggi adalah di provinsi Papua yaitu 59%. NTT sebagai provinsi dengan

total pengeluaran terendah, pangsa pengeluaran untuk makanannya 54,38%, sementara secara nasional adalah 50,14% (Tabel 3.2.6).

Tabel 3.2.6. Persentase Pengeluaran Untuk Makanan Menurut Provinsi, 2018-2022

						(%)
Nie	Burner		Perko	taan+Perde	esaan	
No.	Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022
1	Aceh	56,24	56,30	55,14	56,56	56,64
2	Sumatera Utara	55,38	54,17	53,21	53,19	54,58
3	Sumatera Barat	52,66	52,30	52,21	52,12	53,33
4	Riau	50,50	50,42	49,84	50,06	51,28
5	Jambi	52,83	52,44	52,38	52,00	52,54
6	Sumatera Selatan	51,88	52,04	52,36	52,81	54,03
7	Bengkulu	49,55	49,48	50,30	50,96	52,34
8	Lampung	51,86	52,18	51,72	52,39	53,55
9	Kepulauan Bangka Belitung	50,05	49,78	51,34	51,12	53,29
10	Kepulauan Riau	47,51	44,38	45,13	44,64	46,20
11	DKI Jakarta	41,58	40,70	41,84	39,54	37,75
12	Jawa Barat 49,3		49,71	49,50	49,35	49,28
13	Jawa Tengah	49,11	49,08	48,72	49,49	51,06
14	DI Yogyakarta	40,61	40,79	41,03	41,94	42,48
15	Jawa Timur	49,97	48,53	49,00	50,12	51,57
16	Banten	48,60	49,24	49,88	49,29	51,25
17	Bali	43,89	43,92	44,72	42,79	42,27
18	Nusa Tenggara Barat	57,19	52,44	52,69	53,27	57,46
19	Nusa Tenggara Timur	57,17	57,21	55,73	55,72	54,38
20	Kalimantan Barat	52,06	51,94	51,93	51,87	54,04
21	Kalimantan Tengah	51,66	50,56	50,70	51,09	52,88
22	Kalimantan Selatan	51,06	50,30	50,62	50,67	51,71
23	Kalimantan Timur	45,05	44,78	45,06	42,85	45,25
24	Kalimantan Utara	47,48	49,30	48,13	47,78	48,30
25	Sulawesi Utara	48,26	49,36	48,69	50,59	54,51
26	Sulawesi Tengah	50,48	51,40	49,90	48,71	51,84
27	Sulawesi Selatan	48,75	47,72	48,79	48,32	49,56
28	Sulawesi Tenggara	47,18	46,53	48,83	47,62	48,13
29	Gorontalo	47,12	45,17	44,56	46,23	46,76
30	Sulawesi Barat	52,94	52,96	51,14	50,77	51,46
31	Maluku	50,88	50,61	49,09	48,20	50,39
32	Maluku Utara	49,96	50,12	49,19	49,31	51,85
33	Papua Barat	49,32	48,79	49,31	48,24	49,97
34	Papua	55,48	54,77	55,27	57,94	59,00
	Indonesia	49,51	49,14	49,22	49,25	50,14

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) - BPS

#### 3.2.2. Kemiskinan

Kemiskinan di Indonesia dihitung BPS dengan menggunakan data yang bersumber dari Susenas. Kategori kemiskinan dalam hal ini didasarkan pada penentuan batas berupa Garis Kemiskinan. Garis ini merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Perkembangan jumlah penduduk miskin tahun 2019 sampai dengan 2023 cenderung berfluktuatif dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk miskin sebelum pandemi atau pada Maret 2019 sebanyak 25,14 juta orang atau 9,41%. Jumlah penduduk miskin meningkat memasuki tahun pertama pandemi dan mencapai puncaknya pada Maret 2021 sebanyak 27,54 juta orang atau 10,14% dari total penduduk. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 tercatat sebesar 26,16 juta orang atau setara 9,54 % dari total penduduk Indonesia. Jumlah penduduk miskin tahun 2023 kembali menurun menjadi 25,90 juta orang, jika dibandingkan dengan Maret 2022 jumlah penduduk miskin ini menurun sebanyak 0,26 juta orang. Penurunan kemiskinan ini merupakan bagian dari keberhasilan pemulihan ekonomi pasca pandemi tahun 2021 (Tabel 3.2.7).

Provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi tahun 2023 adalah Jawa Timur sebesar 4,19 juta orang, kedua di Provinsi Jawa Barat sebesar 3,89 juta orang ketiga di Provinsi Jawa Tengah sebesar 3,79 juta orang. Urutan berikutnya adalah Provinsi Sumatera Utara sebesar 1,24 juta orang dan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 1,14 juta orang. Usaha pemerintah dan masyarakat untuk terus mengentaskan kemiskinan semakin menunjukan hasil yang positif. Keberhasilan pembangunan manusia dan ekonomi secara nyata berdampak pada menurunnya jumlah kemiskinan di Indonesia.

Tabel 3.2.7. Jumlah Penduduk Miskin menurut Provinsi, 2019 – 2023

				Talam			(000 Jiwa) Pertumb.
No.	Provinsi			Tahun			2022-2023
		2019	2020	2021	2022	2023	(%)
1	Aceh	819,44	814,91	834,24	806,82	806,75	-0,01
2	Sumatera Utara	1.282,04	1.283,29	1.343,86	1.268,19	1.239,71	-2,25
3	Sumatera Barat	348,22	344,23	370,67	335,21	340,37	1,54
4	Riau	490,72	483,39	500,81	485,03	485,66	0,13
5	Jambi	274,32	277,80	293,86	279,37	280,68	0,47
6	Sumatera Selatan	1.073,74	1.081,58	1.113,76	1.044,69	1.045,68	0,09
7	Bengkulu	302,30	302,58	306,00	297,23	288,46	-2,95
8	Lampung	1.063,66	1.049,32	1.083,93	1.002,41	970,67	-3,17
9	Kepulauan Bangka Belitung	68,38	68,39	72,71	66,78	68,69	2,86
10	Kepulauan Riau	128,46	131,97	144,46	151,68	142,50	-6,05
11	DKI Jakarta	365,55	480,86	501,92	502,04	477,83	-4,82
12	Jawa Barat	3.399,16	3.920,23	4.195,34	4.070,98	3.888,60	-4,48
13	Jawa Tengah	3.743,23	3.980,90	4.109,75	3.831,44	3.791,50	-1,04
14	DI Yogyakarta	448,47	475,72	506,45	454,76	448,47	-1,38
15	Jawa Timur	4.112,25	4.419,10	4.572,73	4.181,29	4.188,81	0,18
16	Banten	654,46	775,99	867,23	814,02	826,13	1,49
17	Bali	163,85	165,19	201,97	205,68	193,78	-5,79
18	Nusa Tenggara Barat	735,96	713,89	746,66	731,94	751,23	2,64
19	Nusa Tenggara Timur	1.146,32	1.153,76	1.169,31	1.131,62	1.141,11	0,84
20	Kalimantan Barat	378,41	366,77	367,89	350,25	353,35	0,89
21	Kalimantan Tengah	134,59	132,94	140,04	145,10	142,17	-2,02
22	Kalimantan Selatan	192,48	187,87	208,11	195,70	188,93	-3,46
23	Kalimantan Timur	219,92	230,26	241,77	236,25	231,07	-2,19
24	Kalimantan Utara	48,78	51,79	52,86	49,46	47,97	-3,01
25	Sulawesi Utara	191,70	192,37	196,35	185,14	189,00	2,08
26	Sulawesi Tengah	410,36	398,73	404,44	388,35	395,66	1,88
27	Sulawesi Selatan	767,80	776,83	784,98	777,44	788,85	1,47
28	Sulawesi Tenggara	302,58	301,82	318,70	309,79	321,53	3,79
29	Gorontalo	186,03	185,02	186,29	185,44	183,71	-0,93
30	Sulawesi Barat	151,40	152,02	157,19	165,72	164,14	-0,95
31	Maluku	317,69	318,18	321,81	290,57	301,61	3,80
32	Maluku Utara	84,60	86,37	87,16	79,87	83,80	4,92
33	Papua Barat	211,50	208,58	219,07	218,78	214,98	-1,74
34	Papua	926,36	911,37	920,44	922,12	915,15	-0,76
	Indonesia	25.144,72	26.424,02	27.542,77	26.161,16	25.898,55	-1,00

Sumber: BPS, Susenas bulan Maret

Wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit tahun 2023 adalah provinsi Kalimantan Utara sebanyak 47,97 ribu orang. Urutan berikutnya di Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 68,69 ribu orang dan di Maluku Utara sebanyak 83,80 ribu orang. Sementara itu, secara persentase (jumlah orang miskin per total penduduknya) penduduk miskin tertinggi ada di Papua sebesar 26,03%. Urutan berikutnya Papua Barat sebesar 20,49%, Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar 19,96%, Maluku sebesar 16,42% dan Gorontalo sebesar 15,15%. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia adalah tingkat pengangguran.

Data kemiskinan akan lebih bermakna jika disajikan dalam persentase terhadap total jumlah penduduk. Hal ini dapat menggambarkan seberapa besar kemiskinan di suatu daerah. Persentase penduduk miskin perkotaan tahun 2023 turun menjadi 7,29% dari 7,5% di tahun 2022 (Tabel 3.2.9). Sementara persentase penduduk miskin perdesaan turun menjadi 12,22%. Tiga provinsi dengan jumlah dan persentase penduduk miskin tertinggi adalah Papua (26,03%), Papua Barat (20,49%) dan NTT (19,96%). Sementara provinsi dengan persentase penduduk miskin di bawah 5% adalah Kepulauan Bangka Belitung (4,52%), Kalimantan Selatan (4,29), Bali (4,25) dan DKI Jakarta (4,44%). Secara rinci persentase penduduk miskin menurut provinsi untuk total perkotaan dan perdesaan dapat dilihat pada Tabel 3.2.8.

Tabel 3.2.8. Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi di Wilayah Perkotaan dan Perdesaan, 2019 – 2023

				Tahun			(%) Pertumb.
No.	Provinsi	2019	2020	2021	2022	2023	2022-2023 (%)
1	Aceh	15,32	14,99	15,33	14,64	14,45	-1,30
2	Sumatera Utara	8,83	8,75	9,01	8,42	8,15	-3,21
3	Sumatera Barat	6,42	6,28	6,63	5,92	5,95	0,51
4	Riau	7,08	6,82	7,12	6,78	6,68	-1,47
5	Jambi	7,6	7,58	8,09	7,62	7,58	-0,52
6	Sumatera Selatan	12,71	12,66	12,84	11,9	11,78	-1,01
7	Bengkulu	15,23	15,03	15,22	14,62	14,04	-3,97
8	Lampung	12,62	12,34	12,62	11,57	11,11	-3,98
9	Kepulauan Bangka Belitung	4,62	4,53	4,9	4,45	4,52	1,57
10	Kepulauan Riau	5,9	5,92	6,12	6,24	5,69	-8,81
11	DKI Jakarta	3,47	4,53	4,72	4,69	4,44	-5,33
12	Jawa Barat	6,91	7,88	8,4	8,06	7,62	-5,46
13	Jawa Tengah	10,8	11,41	11,79	10,93	10,77	-1,46
14	DI Yogyakarta	11,7	12,28	12,8	11,34	11,04	-2,65
15	Jawa Timur	10,37	11,09	11,4	10,38	10,35	-0,29
16	Banten	5,09	5,92	6,66	6,16	6,17	0,16
17	Bali	3,79	3,78	4,53	4,57	4,25	-7,00
18	Nusa Tenggara Barat	14,56	13,97	14,14	13,68	13,85	1,24
19	Nusa Tenggara Timur	21,09	20,9	20,99	20,05	19,96	-0,45
20	Kalimantan Barat	7,49	7,17	7,15	6,73	6,71	-0,30
21	Kalimantan Tengah	4,98	4,82	5,16	5,28	5,11	-3,22
22	Kalimantan Selatan	4,55	4,38	4,83	4,49	4,29	-4,45
23	Kalimantan Timur	5,94	6,1	6,54	6,31	6,11	-3,17
24	Kalimantan Utara	6,63	6,8	7,36	6,77	6,45	-4,73
25	Sulawesi Utara	7,66	7,62	7,77	7,28	7,38	1,37
26	Sulawesi Tengah	13,48	12,92	13	12,33	12,41	0,65
27	Sulawesi Selatan	8,69	8,72	8,78	8,63	8,7	0,81
28	Sulawesi Tenggara	11,24	11	11,66	11,17	11,43	2,33
29	Gorontalo	15,52	15,22	15,61	15,42	15,15	-1,75
30	Sulawesi Barat	11,02	10,87	11,29	11,75	11,49	-2,21
31	Maluku	17,69	17,44	17,87	15,97	16,42	2,82
32	Maluku Utara	6,77	6,78	6,89	6,23	6,46	3,69
33	Papua Barat	22,17	21,37	21,84	21,33	20,49	-3,94
34	Papua	27,53	26,64	26,86	26,56	26,03	-2,00
	Indonesia	9,41	9,78	10,14	9,54	9,36	-1,89

Sumber: BPS, Susenas bulan Maret tiap tahun

Tabel 3.2.9. Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Perkotaan menurut Provinsi, 2019 – 2023

				Tahun			(%) Pertumb.
No.	Provinsi	2019	2020	2021	2022	2023	2022-2023
							(%)
1	Aceh	9,68	9,84	10,46	10,31	9,79	-5,04
2	Sumatera Utara	8,56	8,73	9,15	8,76	8,23	-6,05
3	Sumatera Barat	4,76	4,97	5,30	4,95	4,67	-5,66
4	Riau	6,28	6,12	6,52	6,34	6,73	6,15
5	Jambi	9,81	10,41	11,52	10,51	10,19	-3,04
6	Sumatera Selatan	12,19	12,16	12,36	11,23	11,07	-1,42
7	Bengkulu	14,70	14,77	15,10	14,88	14,21	-4,50
8	Lampung	8,92	9,02	9,29	8,31	8,02	-3,49
9	Kepulauan Bangka Belitung	2,85	3,06	3,57	3,09	3,54	14,56
10	Kepulauan Riau	5,33	5,42	5,72	5,68	5,05	-11,09
11	DKI Jakarta	3,47	4,53	4,72	4,69	4,44	-5,33
12	Jawa Barat	6,03	7,14	7,82	7,57	7,19	-5,02
13	Jawa Tengah	9,20	10,09	10,58	9,92	9,78	-1,41
14	DI Yogyakarta	10,89	11,53	12,23	10,56	10,27	-2,75
15	Jawa Timur	6,84	7,89	8,38	7,71	7,5	-2,72
16	Banten	4,12	5,03	5,93	5,73	6	4,71
17	Bali	3,29	3,33	4,12	4,23	3,77	-10,87
18	Nusa Tenggara Barat	15,74	14,90	14,92	14,10	13,76	-2,41
19	Nusa Tenggara Timur	8,84	8,64	8,60	8,84	9,12	3,17
20	Kalimantan Barat	4,60	4,69	4,68	4,44	4,44	0,00
21	Kalimantan Tengah	4,47	4,62	4,86	5,17	4,78	-7,54
22	Kalimantan Selatan	3,53	3,61	3,89	3,64	3,84	5,49
23	Kalimantan Timur	4,31	4,45	5,01	4,80	4,68	-2,50
24	Kalimantan Utara	5,10	5,06	5,85	5,66	5,18	-8,48
25	Sulawesi Utara	5,01	5,22	5,36	5,14	4,91	-4,47
26	Sulawesi Tengah	9,32	8,76	9,15	9,03	8,9	-1,44
27	Sulawesi Selatan	4,44	4,49	4,77	5,07	5,01	-1,18
28	Sulawesi Tenggara	6,81	7,14	7,66	6,95	7,4	6,47
29	Gorontalo	4,21	3,97	4,23	3,97	4,47	12,59
30	Sulawesi Barat	9,63	9,59	9,82	9,76	9,08	-6,97
31	Maluku	5,84	6,23	6,29	5,82	5,49	-5,67
32	Maluku Utara	4,27	4,53	5,13	5,18	6,23	20,27
33	Papua Barat	5,63	5,85	6,50	6,96	8,23	18,25
34	Papua	4,26	4,47	4,91	5,02	5,68	13,15
	Indonesia	6,69	7,38	7,89	7,50	7,29	-2,80

Sumber: BPS, Susenas bulan Maret

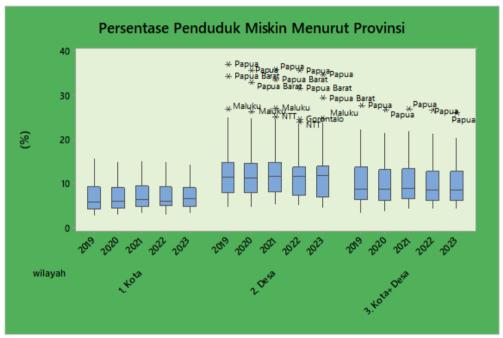
Persentase penduduk miskin perdesaan tahun 2023 sebesar 12,22% turun 0,57% dibandingkan tahun 2022 (Tabel 3.2.10). Angka kemiskinan Indonesia pada tahun 2023 secara umum menunjukkan

perbaikan alias yang terendah semenjak pandemi Covid-19 melanda Tanah Air. Bahkan turunnya angka kemiskinan Indonesia sudah mampu mencapai angka yang lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi Covid-19.

Tabel 3.2.10. Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Perdesaan menurut Provinsi, 2019-2023

				Tahun			(%) Pertumb.
No.	Provinsi	2019	2020	2021	2022	2023	2022-2023 (%)
1	Aceh	18,03	17,46	17,78	16,87	16,92	0,30
2	Sumatera Utara	9,14	8,77	8,84	7,98	8,03	0,63
3	Sumatera Barat	7,88	7,43	7,91	6,86	7,23	5,39
4	Riau	7,62	7,29	7,51	7,08	6,65	-6,07
5	Jambi	6,53	6,23	6,42	6,19	6,28	1,45
6	Sumatera Selatan	13,02	12,96	13,12	12,31	12,21	-0,81
7	Bengkulu	15,49	15,16	15,28	14,49	13,96	-3,66
8	Lampung	14,27	13,83	14,18	13,14	12,65	-3,73
9	Kepulauan Bangka Belitung	6,79	6,33	6,63	6,26	5,85	-6,55
10	Kepulauan Riau	11,04	10,43	11,10	10,68	10,69	0,09
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	9,79	10,27	10,46	9,88	9,3	-5,87
13	Jawa Tengah	12,48	12,80	13,07	12,04	11,87	-1,41
14	DI Yogyakarta	13,89	14,31	14,44	13,65	13,36	-2,12
15	Jawa Timur	14,43	14,77	15,05	13,69	13,98	2,12
16	Banten	7,49	8,18	8,49	7,46	6,79	-8,98
17	Bali	4,88	4,78	5,52	5,39	5,5	2,04
18	Nusa Tenggara Barat	13,45	13,09	13,37	13,24	13,95	5,36
19	Nusa Tenggara Timur	24,91	24,73	25,08	23,86	23,76	-0,42
20	Kalimantan Barat	9,05	8,50	8,54	8,06	8,07	0,12
21	Kalimantan Tengah	5,33	4,96	5,38	5,36	5,35	-0,19
22	Kalimantan Selatan	5,47	5,08	5,71	5,31	4,72	-11,11
23	Kalimantan Timur	9,31	9,51	9,87	9,64	9,28	-3,73
24	Kalimantan Utara	9,02	9,46	9,82	8,75	8,74	-0,11
25	Sulawesi Utara	10,56	10,25	10,61	9,77	10,38	6,24
26	Sulawesi Tengah	15,26	14,69	14,73	13,87	14,09	1,59
27	Sulawesi Selatan	11,95	11,97	12,05	11,63	11,91	2,41
28	Sulawesi Tenggara	14,09	13,50	13,89	13,57	13,94	2,73
29	Gorontalo	23,79	23,45	24,47	24,42	23,73	-2,83
30	Sulawesi Barat	11,45	11,26	11,67	12,26	12,1	-1,31
31	Maluku	26,83	26,21	26,96	23,50	24,64	4,85
32	Maluku Utara	7,78	7,70	7,59	6,66	6,55	-1,65
33	Papua Barat	34,19	32,70	33,40	31,42	29,2	-7,07
34	Papua	36,84	35,50	35,71	35,39	34,49	-2,54
	Indonesia er: BPS, Susenas bulan Maret	12,85	12,82	13,10	12,29	12,22	-0,57

Jika dirinci menurut provinsi, persentase penduduk miskin di perdesaan tahun 2023 tertinggi adalah di Provinsi Papua sebesar 34,49% dan persentase ini sedikit turun dibandingkan tahun sebelumnya. Kedua Provinsi Papua Barat sebesar 29,2%, Ketiga Provinsi Maluku sebesar 24,64% dan keempat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 23,76%. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.2.10.



Gambar 3.2.7. Boxplot Persentase Penduduk Miskin Wilayah Perkotaan, Perdesaan dan Total menurut Provinsi, 2019– 2023

Gambar 3.2.7 menunjukan hasil analisis boxplot yang menggambarkan persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 2019-2023. Pada wilayah perkotaan, persentase penduduk miskin tidak menunjukan adanya data ekstrim serta relatif stagnan untuk periode 2019 – 2023. Pada wilayah perdesaan, Provinsi Papua, Papua Barat dan Maluku merupakan 3 provinsi pencilan atas dimana persentasenya lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Tahun 2022 Gorontalo masuk ke dalam provinsi pencilan atas. Namun demikian gambaran secara total perkotaan

dan perdesaan, hanya Provinsi Papua saja yang merupakan provinsi dengan persentase ekstrim atas.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masingmasing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

kemiskinan merupakan ukuran Indeks kedalaman rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2023 sebesar 1,53 turun dibandingkan September 2022 yang sebesar 1,56 untuk wilayah perkotaan dan perdesaan. Turunnya indeks kedalaman kemiskinan tersebut menunjukkan bahwa perbaikan ekonomi yang dilakukan pemerintah sudah tepat sasaran sehingga mampu mengurangi kesenjangan penduduk miskin dari garis kemiskinannya. Untuk nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) perdesaan secara umum lebih tinggi daripada perkotaan. Pada Maret 2023, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan sebesar 1,16, sedangkan di perdesaan jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 2,03 (Tabel 3.2.11).

Indeks Keparahan Kemiskinan pada tahun 2023 mengalami stagnasi atau sama seperti tahun 2022 sebesar 0,38. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di perdesaan secara umum juga lebih tinggi daripada perkotaan. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di perkotaan adalah sebesar 0,28 sedangkan di perdesaan mencapai 0,51. Indeks kedalaman kemiskinan ini merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sebalik, semakin kecil nilai indeks maka semakin mendekati garis kemiskinan (Tabel 3.2.12).

Tabel 3.2.11. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Provinsi

		Perkotaan			Perdesaan		(%) Perkotaan+Perdesaan			
	20	)22	2023	20	)22	2023	20	)22	2023	
Provinsi	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)	Semester 1 (Maret)	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)	Semester 1 (Maret)	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)	Semester 1 (Maret)	
Aceh	1.62	2.13	1.93	2.93	3.30	3.20	2.49	2.90	2.76	
Sumatera Utara	1.40	1.44	1.24	1.32	1.37	1.29	1.36	1.41	1.26	
Sumatera Barat	0.65	0.78	0.69	0.96	0.94	0.96	0.80	0.86	0.82	
Riau	0.92	0.96	0.99	1.21	0.98	1.00	1.10	0.97	1.00	
Jambi	1.67	1.74	1.62	0.93	0.92	0.99	1.17	1.19	1.19	
Sumatera Selatan	2.00	1.85	1.78	1.94	1.75	1.69	1.96	1.79	1.72	
Bengkulu	2.61	2.06	2.22	2.34	2.23	2.10	2.43	2.17	2.14	
Lampung	1.23	1.33	1.20	2.10	1.88	1.85	1.82	1.70	1.64	
Kepulauan Bangka Belitung	0.39	0.30	0.49	0.87	0.60	0.82	0.60	0.43	0.63	
Kepulauan Riau	1.00	0.78	0.70	1.41	1.72	1.74	1.05	0.89	0.82	
DKI Jakarta	0.77	0.68	0.69	-	-	-	0.77	0.68	0.69	
Jawa Barat	1.21	1.14	1.10	1.72	1.62	1.40	1.32	1.24	1.16	
Jawa Tengah	1.56	1.64	1.67	2.00	1.88	1.83	1.77	1.75	1.75	
DI Yogyakarta	1.93	1.38	1.62	2.25	1.95	2.01	2.01	1.53	1.72	
Jawa Timur	1.14	1.21	1.19	2.21	2.13	2.19	1.62	1.62	1.63	
Banten	0.96	0.71	1.25	1.22	1.03	1.06	1.03	0.79	1.20	
Bali	0.62	0.45	0.48	0.64	0.86	0.74	0.62	0.56	0.55	
Nusa Tenggara Barat	2.58	2.79	2.28	2.40	2.33	2.48	2.49	2.57	2.38	
Nusa Tenggara Timur	1.51	1.01	1.21	4.35	4.69	4.07	3.63	3.74	3.33	
Kalimantan Barat	0.54	0.69	0.59	1.33	1.34	1.29	1.04	1.10	1.03	
Kalimantan Tengah	0.83	0.58	0.59	0.98	0.72	0.72	0.91	0.66	0.66	
Kalimantan Selatan	0.52	0.39	0.42	0.75	0.86	0.80	0.63	0.63	0.61	
Kalimantan Timur	0.67	0.63	0.60	1.69	1.12	1.15	0.99	0.78	0.77	
Kalimantan Utara	0.74	0.48	0.56	1.16	0.82	0.78	0.89	0.60	0.64	
Sulawesi Utara	0.83	0.75	0.69	1.52	1.55	1.57	1.15	1.11	1.09	
Sulawesi Tengah	1.49	1.83	1.53	2.84	2.29	2.40	2.41	2.15	2.12	
Sulawesi Selatan	0.76	0.76	0.71	1.87	2.13	2.31	1.36	1.50	1.57	
Sulawesi Tenggara	1.03	0.91	1.08	2.27	2.70	2.51	1.82	2.05	1.96	
Gorontalo	0.32	0.67	0.67	5.18	4.63	4.73	3.04	2.85	2.92	
Sulawesi Barat	1.59	1.34	1.66	2.37	2.28	1.84	2.21	2.09	1.80	
Maluku	0.79	0.86	0.83	4.46	4.86	4.77	2.90	3.08	3.08	
Maluku Utara	0.55	0.58	1.05	1.06	1.49	1.10	0.91	1.23	1.08	
Papua Barat	1.17	1.11	1.78	7.38	8.46	7.18	4.82	5.25	4.94	
Papua	0.53	0.90	0.87	8.47	9.92	8.48	6.16	7.28	6.25	
Indonesia	1.19	1.16	1.16	2.13	2.11	2.03	1.59	1.56	1.53	

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 3.2.12. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi

		Perkotaan			Perdesaan		Peri	kotaan+Perde:	(%) saan
Provinsi	20	022	2023	20	022	2023	2	022	2023
FIOVIIISI	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)	Semester 1 (Maret)	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)	Semester 1 (Maret)	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)	Semester 1 (Maret)
Aceh	0.38	0.57	0.55	0.74	0.89	0.90	0.61	0.78	0.78
Sumatera Utara	0.34	0.33	0.31	0.34	0.35	0.34	0.34	0.34	0.32
Sumatera Barat	0.13	0.17	0.15	0.20	0.18	0.20	0.16	0.17	0.18
Riau	0.21	0.20	0.25	0.30	0.19	0.23	0.27	0.19	0.24
Jambi	0.38	0.39	0.37	0.20	0.16	0.25	0.26	0.24	0.29
Sumatera Selatan	0.47	0.42	0.43	0.44	0.36	0.37	0.45	0.39	0.39
Bengkulu	0.68	0.43	0.60	0.54	0.49	0.48	0.58	0.47	0.52
Lampung	0.27	0.37	0.27	0.48	0.39	0.40	0.41	0.39	0.36
Kepulauan Bangka Belitung	0.09	0.03	0.11	0.18	0.10	0.16	0.13	0.06	0.13
Kepulauan Riau	0.25	0.15	0.15	0.29	0.43	0.39	0.25	0.19	0.18
DKI Jakarta	0.19	0.16	0.17	-	-	-	0.19	0.16	0.17
Jawa Barat	0.30	0.26	0.26	0.43	0.41	0.34	0.33	0.29	0.27
Jawa Tengah	0.37	0.41	0.41	0.47	0.44	0.42	0.42	0.42	0.41
DI Yogyakarta	0.48	0.25	0.37	0.58	0.38	0.41	0.51	0.28	0.38
Jawa Timur	0.26	0.27	0.27	0.52	0.47	0.49	0.38	0.36	0.37
Banten	0.25	0.12	0.39	0.32	0.27	0.26	0.27	0.16	0.36
Bali	0.14	0.08	0.09	0.11	0.17	0.14	0.13	0.10	0.10
Nusa Tenggara Barat	0.68	0.75	0.53	0.66	0.54	0.66	0.67	0.65	0.59
Nusa Tenggara Timur	0.34	0.16	0.27	1.13	1.22	0.98	0.93	0.95	0.80
Kalimantan Barat	0.09	0.12	0.12	0.33	0.31	0.32	0.24	0.24	0.24
Kalimantan Tengah	0.19	0.11	0.14	0.33	0.14	0.14	0.27	0.12	0.14
Kalimantan Selatan	0.11	0.07	0.07	0.16	0.22	0.24	0.13	0.15	0.16
Kalimantan Timur	0.15	0.10	0.11	0.40	0.17	0.20	0.23	0.12	0.14
Kalimantan Utara	0.15	0.10	0.11	0.25	0.09	0.10	0.19	0.10	0.11
Sulawesi Utara	0.19	0.17	0.16	0.34	0.34	0.38	0.26	0.25	0.26
Sulawesi Tengah	0.41	0.52	0.44	0.81	0.56	0.59	0.68	0.54	0.54
Sulawesi Selatan	0.18	0.15	0.16	0.43	0.52	0.62	0.32	0.35	0.41
Sulawesi Tenggara	0.22	0.19	0.23	0.53	0.70	0.64	0.42	0.51	0.48
Gorontalo	0.05	0.15	0.13	1.48	1.13	1.23	0.85	0.69	0.74
Sulawesi Barat	0.37	0.32	0.38	0.63	0.57	0.42	0.58	0.52	0.42
Maluku	0.16	0.22	0.20	1.27	1.34	1.36	0.80	0.84	0.86
Maluku Utara	0.11	0.12	0.24	0.24	0.43	0.22	0.20	0.34	0.23
Papua Barat	0.33	0.25	0.62	2.49	3.04	2.48	1.60	1.82	1.71
Papua	0.11	0.21	0.21	2.91	3.89	2.95	2.10	2.82	2.15
Indonesia	0.29	0.26	0.28	0.54	0.54	0.51	0.39	0.38	0.38

Sumber : Badan Pusat Statistik

#### 3.3. Aspek Kualitas dan Keamanan Pangan

## 3.3.1. Konsumsi Energi/Kalori dan Protein

Aspek kualitas dan keamanan pangan, salah satunya dicerminkan dari tingkat konsumsi energi dan protein terhadap standar ideal berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) 2018 adalah 2.100 kkal/kapita/hari untuk energi dan 57 gram kapita/hari untuk protein. Konsumsi energi dan protein penduduk Indonesia tahun 2020 - 2022 seperti tersaji pada Tabel 3.3.1, menunjukkan tahun 2020 dan 2021 telah melebihi standar ideal yaitu konsumsi energi tahun 2020 sebesar 2.112 kkal/kap/hari (102,57%) dan tahun 2021 sebesar 2.143 kkal/kap/hari (102,06%), sementara tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 2.079 Kkal/kap/hari (99.00%), menunjukan kurang terhadap standar ideal. Demikian pula konsumsi protein mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, dimana tahun 2021 sebesar 62,28 gram/kap/hari (109,26%) menjadi 62,21 gram/kap/hari (109,15%), tetapi sudah diatas standard ideal.

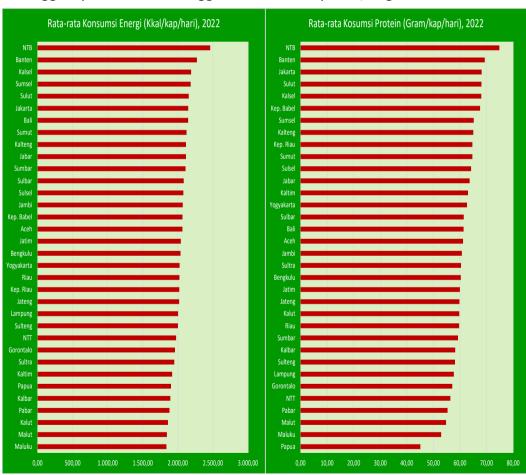
Tabel 3.3.1. Konsumsi Energi dan Protein Penduduk Indonesia, 2020-2022

Tahun	Kalori/	Energi	Protein				
Tanun	Kkal/kapita/hari	% Thd Standar	Gram/kapita/hari	% Thd Standar			
2020	2.112	100,57	61,98	108,74			
2021	2.143	102,06	62,28	109,26			
2022	2.079	99,00	62,21	109,15			

Sumber: Susenas Maret, BPS

Seiring dengan konsumsi energi secara nasional tahun 2022 kurang dari standar nasional dengan konsumsii protein sudah melebihi standar nasional, maka terdapat beberapa provinsi dengan tingkat konsumsi energi atau protein di bawah standar. Pada tahun 2022 terdapat 23 (dua puluh

tiga) provinsi dengan rata-rata konsumsi energi di bawah standar dan 5 (lima) provinsi dengan rata-rata konsumsi protein dibawah standar (Gambar 3.3.1). Provinsi dengan rata-rata konsumsi energi per kapita/hari terendah adalah Maluku dan Maluku Utara masing-masing 1.836,68 kkal dan 1.843,68 kkal, sedangkan konsumsi energi tertinggi di provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai 2.460,44 kkal. Sementara provinsi dengan rata-rata konsumsi protein per kapita per hari terendah terdapat di provinsi Papua dan Maluku masing-masing 45,07 gram dan 52,91 gram, sedangkan tertinggi di provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai 74,82 gram.



Gambar 3.3.1. Rata - Rata Konsumsi Energi dan Protein per Provinsi, 2022

### 3.3.2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Keragaman konsumsi pangan nasional yang ditunjukkan dengan capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) seperti tersaji pada tabel 3.3.2, menujukkan pola konsumsi pangan masih belum beragam dan bergizi seimbang, dilihat dari belum tercapainya skor PPH ideal 100. Dari tabel 3.3.2 menujukkan terjadinya kenaikan skor dari 87,2 pada tahun 2021 menjadi 92,9 pada tahun 2022 atau masih kurang 7,1% dari skor ideal (Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.100 kkal/kapita/hari). Peningkatan ini dipengaruhi oleh kenaikan konsumsi energi dari kelompok kacang-kacangan, sayur dan buah serta kelompok pangan hewani, walaupun kelompok lain mengalami penurunan.

Tabel 3.3.2. Konsumsi Energi dan Skor Pola Pangan Harapan menurut Kelompok Pangan, 2018 - 2022

	Relatified Full 2010 2022												
Nο	Kelompok Pangan		Energi (kkal/kap/hari)					Skor PPH (%)					
140	rteiompok i angan	2018	2019	2020	2021	2022	Ideal	2018	2019	2020	2021	2022	ldeal
1	Padi - padian	1.315	1.288	1.267	1.262	1.189	1.050	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
2	Umbi - umbian	53	50	48	59	56	126	1,2	1,2	1,2	1,4	1,3	2,5
3	Pangan Hewani	233	240	244	244	253	252	21,6	22,9	23,2	23,3	24,0	24,0
4	Minyak dan Lemak	240	242	249	270	250	210	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	22	21	20	21	19	63	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,0
6	Kacang-kacangan	60	59	56	57	69	105	5,6	5,6	5,3	5,4	6,5	10,0
7	Gula	78	76	75	77	72	105	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	2,5
8	Sayur dan Buah	113	109	102	104	121	126	26,2	26,0	24,4	24,8	28,9	30,0
9	Lain-lain	52	52	51	50	49	63	-	-	-	-	-	•
	Total	2.165	2.138	2.112	2.143	2.079	2.100	87,0	87,9	86,3	87,2	92,9	100,0

Sumber : Susenas Maret, BPS diolah Bapanas

Keterangan: Angka Kecukupan Energi 2.100 kkal/kap/hari (Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi XI, 2018)

# 3.3.3. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan dan FIES

Prevalence of Undernourishment (PoU) merupakan proporsi penduduk yang mengalami kekurangan konsumsi pangan yang diukur dari asupan energi minimum untuk dapat hidup sehat dan aktif terhadap populasi penduduk secara keseluruhan. Individu dikategorikan sebagai kekurangan konsumsi pangan apabila jumlah asupan energi per hari kurang dari kebutuhan minimum untuk hidup sehat dan aktif. Standar minimum yang digunakan untuk perhitungan PoU disesuaikan dengan kebutuhan kalori individu menurut jenis kelamin, umur pada tinggi badan dan berat badan tertentu serta aktivitas yang dilakukan. Pengkatagorian persentase PoU dibagi dalam 5 status yaitu sangat rendah bila PoU <2,5%, rendah nilai PoU 2,5% sd 4%, sedang nilai PoU 5%-19%, tinggi nilai PoU 20%-34% dan sangat tinggi nilai PoU > 35%.



Gambar 3.3.2. Perkembangan Kerawanan Pangan (PoU) dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (*FIES*) di Indonesia, 2020 - 2022

Berdasarkan data PoU tahun 2020-2022 yang bersumber dari BPS seperti tersaji pada Gambar 3.3.2, menunjukkan bahwa angka PoU Indonesia terlihat meningkat yaitu tahun 2020 sebesar 8,34% meningkat menjadi 8,49% di tahun 2021 dan meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 10,21% dengan status "sedang" (Gambar 3.2.2).

Capaian PoU pada tingkat nasional ini juga sejalan dengan capaian di tingkat provinsi. Angka PoU di sebagian besar provinsi di Indonesia secara konsisten mengalami peningkatan pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2022, provinsi dengan angka PoU status sangat rendah adalah Povinsi NTB dan Banten yaitu masing-masing sebesar 2,24% dan 2,46%, sementara Provinsi DKI Jakarta dari status "sangat rendah" tahun 2021 menurun menjadi "rendah" tahun 2022 dengan niali PoU sebesar 3,42%. Sedangkan provinsi dengan angka PoU tertinggi tahun 2022 adalah Papua sebesar 36,18%, sementara provinsi Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat memiliki angka PoU dengan status "tinggi" tahun 2022 masing-masing sebesar 31,68% (Maluku), 30,71% (Maluku Utara) dan 29,38% (Papua Barat), secara rinci sebaran PoU per provinsi tahun 2020-2022 disajikan pada Tabel 3.3.3.

Tabel 3.3.3. Prevelansi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan per Provinsi, 2020 - 2022

No	Provinsi	2020			2021	2022		
No	Provinsi	PoU (%)	Status	PoU (%)	Status	PoU (%)	Status	
1	Aceh	8,58	sedang	6,90	sedang	10,98	sedang	
2	Sumatera Utara	6,73	sedang	6,33	sedang	8,7	sedang	
3	Sumatera Barat	5,86	sedang	6,02	sedang	7,31	sedang	
4	Riau	9,16	sedang	10,61	sedang	15,12	sedang	
5	Jambi	9,12	sedang	9,25	sedang	12,14	sedang	
6	Sumatera Selatan	9,77	sedang	6,82	sedang	7,37	sedang	
7	Bengkulu	7,72	sedang	8,64	sedang	11,66	sedang	
8	Lampung	12,19	sedang	10,25	sedang	14,63	sedang	
9	Kepulauan Bangka Belitung	9,35	sedang	11,05	sedang	15,19	sedang	
10	Kepulauan Riau	6,07	sedang	7,71	sedang	11,3	sedang	
11	DKI Jakarta	1,94	sangat rendah	2,20	sangat rendah	3,42	rendah	
12	Jawa Barat	3,90	rendah	4,44	rendah	6,75	sedang	
13	Jawa Tengah	11,80	sedang	12,34	sedang	12,34	sedang	
14	DI Yogyakarta	9,90	sedang	10,18	sedang	13,48	sedang	
15	Jawa Timur	8,58	sedang	9,14	sedang	10,27	sedang	
16	Banten	2,11	sangat rendah	2,80	rendah	2,46	sangat rendah	
17	Bali	4,01	rendah	7,43	sedang	7,72	sedang	
18	Nusa Tenggara Barat	2,97	rendah	1,78	sangat rendah	2,24	sangat rendah	
19	Nusa Tenggara Timur	13,12	sedang	11,84	sedang	13,74	sedang	
20	Kalimantan Barat	19,92	tinggi	19,60	sedang	19,22	sedang	
21	Kalimantan Tengah	10,10	sedang	8,88	sedang	12,83	sedang	
22	Kalimantan Selatan	2,72	rendah	2,78	rendah	4,47	rendah	
23	Kalimantan Timur	8,24	sedang	12,56	sedang	16,19	sedang	
24	Kalimantan Utara	12,11	sedang	12,75	sedang	23,01	tinggi	
25	Sulawesi Utara	4,49	rendah	6,91	sedang	6,22	sedang	
26	Sulawesi Tengah	8,85	sedang	10,63	sedang	11,92	sedang	
27	Sulawesi Selatan	10,14	sedang	7,93	sedang	10,79	sedang	
28	Sulawesi Tenggara	10,06	sedang	11,17	sedang	17,14	sedang	
29	Gorontalo	10,33	sedang	14,84	sedang	18,63	sedang	
30	Sulawesi Barat	9,16	sedang	10,81	sedang	9,82	sedang	
31	Maluku	35,55	sangat tinggi	29,62	tinggi	31,68	tinggi	
32	Maluku Utara	35,48	sangat tinggi	28,86	tinggi	30,71	tinggi	
33	Papua Barat	23,09	tinggi	24,59	tinggi	29,38	tinggi	
34	Papua	31,49	tinggi	37,37	sangat tinggi	36,18	sangat tinggi	
	Indonesia	8,34	sedang	8,49	sedang	10,21	sedang	

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret - BPS

Keterangan: PoU (Prevalence of Undernourishment) atau Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Selanjutnya kerawanan pangan sedang dan berat dapat diukur dengan FIES (*Food Insecurity Experianced Scale*) yang merupakan angka kerawanan pangan berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan. Nilai skor FIES terdiri dari (1) rawan pangan ringan atau khawatir dengan skor < 4, (2) sedang yaitu kompromi dengan kualitas dan jenis makanan atau kompromi dengan kuantitas makanan dengan skor 4-6 dan (3) parah yaitu tidak makan atau lapar karena kurangnya uang atau sumber daya lainnya dengan skor 7-8.

Berdasarkan data yang bersumber dari BPS, perkembangan penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat di Indonesia tahun 2020-2022 tersaji pada Gambar 3.3.2, terlihat tren penurunan yang berarti persentase penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan guna mencukupi kebutuhan enegi sehari-hari makin menurun yaitu tahun 2020 sebesar 5,12% kemudian menurun menjadi 4,79% tahun 2021, namun tahun 2022 meningkat menjadi 4,85%.

Nilai FIES tahun 2022 terendah berada di 5 (lima) Provinsi yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan Selatan masing-masing sebesar 2,16%, 2,69%, 3,0%, 3,16% dan 3,19%. Sedangkan provinsi dengan nilai FIES tertinggi tahun 2022 berada di Nusa Tenggara Barat, Maluku, Papua Barat dan Maluku Utara masing-masing sebesar 14,48%, 11,18%, 10,31% dan 10,28%, secara rinci sebaran FIES per provinsi tahun 2020-2022 disajikan pada Tabel 3.3.4.

Tabel 3.3.4. Perkembangan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (*FIES*) Menurut Provinsi, 2020 – 2022

	Menurut Provinsi, 2	FIES (%)					
No	Provinsi	2020	2021	2022			
1	Aceh	4,88	4,39	4,69			
2	Sumatera Utara	6,41	6,64	6,53			
3	Sumatera Barat	5,91	5,38	5,24			
4	Riau	4,91	4,94	5,06			
5	Jambi	4,70	4,07	3,75			
6	Sumatera Selatan	6,87	5,15	4,59			
7	Bengkulu	4,87	4,31	3,84			
8	Lampung	7,51	5,66	6,21			
9	Kepulauan Bangka Belitung	3,10	3,81	2,16			
10	Kepulauan Riau	4,77	7,55	4,45			
11	DKI Jakarta	3,13	3,57	3,77			
12	Jawa Barat	5,79	5,46	5,18			
13	Jawa Tengah	2,84	2,87	3,00			
14	DI Yogyakarta	2,00	3,25	2,69			
15	Jawa Timur	3,24	2,98	3,16			
16	Banten	6,31	4,86	5,62			
17	Bali	1,84	4,51	4,04			
18	Nusa Tenggara Barat	10,85	9,44	7,86			
19	Nusa Tenggara Timur	15,46	15,31	14,48			
20	Kalimantan Barat	7,08	6,15	6,15			
21	Kalimantan Tengah	4,31	3,61	3,47			
22	Kalimantan Selatan	3,70	3,99	3,19			
23	Kalimantan Timur	4,84	4,29	3,46			
24	Kalimantan Utara	3,37	4,54	6,57			
25	Sulawesi Utara	6,29	6,71	5,40			
26	Sulawesi Tengah	9,61	7,73	7,21			
27	Sulawesi Selatan	4,33	4,02	3,78			
28	Sulawesi Tenggara	5,58	5,53	4,42			
29	Gorontalo	5,67	9,00	5,15			
30	Sulawesi Barat	8,25	7,88	7,13			
31	Maluku	10,95	11,62	11,18			
32	Maluku Utara	12,55	10,16	10,28			
33	Papua Barat	8,56	8,41	10,31			
34	Papua	8,68	7,58	6,77			
	Indonesia	5,12	4,79	4,85			

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret - BPS

Keterangan: FIES (Food Insecurity Experianced Scale), skala pengalaman kerawanan pangan

# BAB IV. ANALISIS KOMODITAS PANGAN STRATEGIS

### 4.1. Neraca Penyediaan dan Kebutuhan Pangan

Tingginya ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap konsumsi beras menyebabkan bahan pokok tersebut memiliki nilai strategis baik secara politik maupun ekonomi. Sehingga informasi perkiraan kondisi neraca ketersediaan dan kebutuhan beras melalui perhitungan prognosa sangat diperlukan sebagai acuan dalam perencanaan dan upaya penyediaan pangan nasional. Tim penyusun prognosa neraca pangan strategis yang dikoordinir oleh Ditjen sub sektor lingkup Kementerian Pertanian, BPS, dan Pusdatin, serta dilakukan updating data setiap akhir bulan sesuai rilis publikasi data penyusunnya. Berdasarkan prognosa neraca beras tahun 2023 yang dilakukan update data per Oktober 2023. Perkiraan penyediaan beras Indonesia berasal dari perkiraan produksi GKG Januari-Desember berdasarkan KSA BPS sebesar 53,62 juta ton dengan total perkiraan produksi beras 30,89 juta ton. Perkiraan total kebutuhan beras 2023 sebesar 30,90 juta ton yang terdiri dari konsumsi langsung dalam rumah tangga sebesar 22,60 juta ton dan konsumsi di luar rumah tangga sebesar 8,29 juta ton. Sehingga tahun 2023 diperkirakan terjadi surplus sebesar 3,51 juta ton, dengan adanya stok akhir Desember 2022 sebesar 4,06 juta ton sehingga neraca beras kumulatif sd Desember 2023 menjadi 7,57 juta ton seperti tersaji tabel 4.1.1.

Meskipun perkiraan neraca bulanan beras tahun 2023 terlihat surplus, namun terdapat bulan yang mengalami defisit yaitu Januari, Oktober, November s.d Desember dan bulan lainnya surplus (Gambar 4.1.1). Surplus neraca kumulatif bulanan beras tertinggi selama tahun 2023 terjadi pada bulan Maret 2022 sebesar 2,65 juta ton dan terendah terjadi pada September 2023 sebesar 108,15 ribu ton. Sementara defisit terbesar terjadi pada Januari dan November masing-masing 1,03 juta ton dan

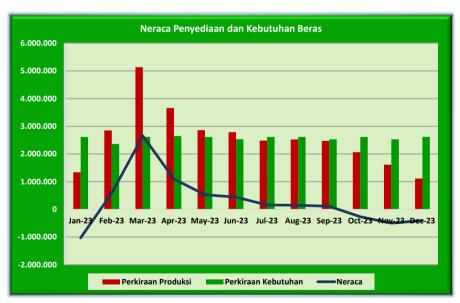
498,58 ribu ton, namun karena adanya stok akhir Desember 2022 dapat menutupi defisit tersebut.

Tabel 4.1.1. Realisasi dan Prognosa Neraca Penyediaan dan Kebutuhan Beras, Januari - Desember 2023

		ocias, s			11501 20				
	Perkiraan Produksi GKG	Perkiraan Produksi (Beras)	Impor	Perkiraan Ketersediaan Beras	Perkiraa	n Kebutuhai	ı (Ton)	Perkiraan Neraca Bulanan	Perkiraan Neraca Kumulatif (Surplus/ Defisit)
Bulan					Konsumsi Langsung	Konsumsi luar RT	Total	(Produksi - Kebutuhan)	
Stok Akhir Desember 2022									4.064.238
Jan-23	2.328.609	1.340.906	240.955	1.581.861	1.911.758	701.523	2.613.281	-1.031.420	3.032.818
Feb-23	4.949.751	2.849.262	92.358	2.941.620	1.726.749	633.634	2.360.383	581.237	3.614.055
Mar-23	8.916.267	5.134.806	136.640	5.271.446	1.915.458	702.881	2.618.339	2.653.107	6.267.162
Apr-23	6.351.760	3.659.442	81.550	3.740.992	1.936.426	710.575	2.647.001	1.093.991	7.361.153
Mai-23	4.962.529	2.860.580	283.075	3.143.655	1.911.758	701.523	2.613.281	530.374	7.891.527
Jun-23	4.838.113	2.786.597	183.620	2.970.216	1.851.630	679.459	2.531.089	439.127	8.330.654
Ju⊦23	4.310.177	2.482.905	285.267	2.768.171	1.911.758	701.523	2.613.281	154.890	8.485.544
Agts-23	4.380.256	2.523.942	238.823	2.762.765	1.911.758	701.523	2.613.281	149.484	8.635.028
Sep-23	4.288.542	2.472.063	165.068	2.637.131	1.850.089	678.893	2.528.982	108.149	8.743.177
Okt-23	3.576.966	2.062.970	281.252	2.344.221	1.911.758	701.523	2.613.281	-269.060	8.474.118
Nov-23	2.795.325	1.611.401	419.000	2.030.401	1.850.089	678.893	2.528.982	-498.581	7.975.537
Des-23	1.927.245	1.110.562	1.100.699	2.211.261	1.913.608	702.202	2.615.810	-404.549	7.570.988
Total 2023	53.625.540	30.895.434	3.508.306	34.403.740	22.602.840	8.294.151	30.896.990	3.506.750	7.570.988

Sumber : BPS dan Kementan, diolah Badan Pangan Nasional Update 20 Oktober 2023 Keterangan : 1. Angka Stok awal Januari 2023 berdasarkan hasi survey stok beras Badan Pangan Nasional dan BPS

<sup>4.</sup> Impor beras berdasarkan laporan Managerial Perum BULOG dan Kemendag 17 Oktober 2023



Gambar 4.1.1. Neraca Penyediaan dan Kebutuhan Beras, Januari -Desember 2023

<sup>2.</sup> Produksi Januari-September 2023 berdasarkan KSA BPS dan Produksi Bulan Oktober-Desember potensi KSA.

<sup>3.</sup> Konsumsi beras tahun 2023 terdiri dari konsumsi RT tiap provinsi (Susenas BPS Tri I 2023) dan konsumsi luar RT tiap provinsi (survei Bapok BPS 2017)

Jagung sebagai bahan baku pakan ternak, terllihat prognosa neraca jagung wujud pipilan kering tahun 2023 mengalami defisit sebesar 827,49 ribu ton yang berasal dari ketersediaan sebesar 14,87 juta ton dengan kebutuhan sebesar 15,70 juta ton. Perkiraan neraca bulanan jagung pipilan selama tahun 2023 mengalami defisit hampir setiap bulan kecuali pada Januari, Juli, Agustus dan September. Defisit jagung terbesar di bulan Mei dan Maret masing-masing sebesar 364,51 ribu ton dan 313,57 ribu ton, dan terendah di bulan Desember sebesar 36,49 ribu ton. Sebaliknya surplus neraca bulanan jagung pipilan kering terbesar pada bulan Agustus sebesar 241,92 ribu. Namun dengan adanya stok akhir Desember 2022 sebesar 2,77 jurta ton dapat menutupi defisit tersebut bahkan sd Desember 2023 diperkirakan surplus 1,94 juta ton, seperti tersaji pada Tabel 4.1.2

Tabel 4.1.2. Realisasi dan Prognosa Neraca Penyediaan dan Kebutuhan Jagung dan Kedelai, Januari - Desember 2023

	Jagu	ing dan i	reaciai, .	Desember 2023						
		Jagu	ing		Kedelai					
Bulan	Total Ketersediaan	Perkiraan Kebutuhan	Perkiraan Neraca Bulanan (Produksi Bersih -	Perkiraan Neraca Kumulatif (Surplus/ Defisit)	Total Ketersediaan	Perkiraan Kebutuhan	Perkiraan Neraca Bulanan (Ketersediaan- Kebutuhan)	Perkiraan Neraca Kumulatif (Surplus/ Defisit)		
Stok Akhir	Desember 2022	2	2.770.423					162.000		
Jan-23	1.381.179	1.275.367	105.812	2.876.235	241.549	215.997	25.551	187.551		
Feb-23	1.361.179	1.408.952	-47.773	2.828.462	153.780	193.915	-40.135	147.416		
Mar-23	1.198.933	1.512.502	-313.569	2.514.893	321.158	238.418	82.740	230.156		
Apr-23	803.273	854.373	-51.101	2.463.792	263.024	207.595	55.429	285.585		
Mai-23	1.233.525	1.598.036	-364.510	2.099.282	321.477	214.409	107.068	392.653		
Jun-23	1.298.835	1.425.879	-127.044	1.972.238	195.126	209.129	-14.003	378.650		
Jul-23	1.324.673	1.220.899	103.775	2.076.013	195.834	215.458	-19.625	359.025		
Agts-23	1.365.142	1.123.220	241.922	2.317.936	193.614	218.729	-25.115	333.910		
Sep-23	1.485.148	1.452.020	33.128	2.351.064	239.963	216.485	23.478	357.389		
Okt-23	1.117.394	1.341.839	-224.445	2.126.619	200.329	219.758	-19.429	337.960		
Nov-23	1.087.714	1.234.912	-147.198	1.979.421	198.508	218.387	-19.879	318.081		
Des-23	1.216.314	1.252.810	-36.496	1.942.925	159.279	223.100	-63.822	254.259		
Total 2023	14.873.309	15.700.808	-827.499	1.942.925	2.683.640	2.591.381	92.259	254.259		

Sumber: BPS, Kementan, dan Asosiasi Pengrajin Tahu Tempe diolah Badan Pangan Nasional Update 20 Oktober 2023

Total perkiraan penyediaan kedelai tahun 2023 sebesar 2,68 juta ton yang berasal dari produksi dalam negeri sebesar 346,82 ribu ton (12,92%), kedelai impor sebesar 2,34 juta ton (87,16%) dan kedele ekspor sebesar 2,20 ribu ton (0,08%). Sementara perkiraan total kebutuhan

kedelai 2023 sebesar 2,59 juta ton sehingga perkiraan neraca bulanan mengalami surplus 92,26 ribu ton. Adanya stok akhir Desember 2022 sebesar 162 ribu ton menyebabkan neraca kedelai kumulatif sd Desember 2023 surplus 254,26 ribu ton seperti tersaji tabel 4.1.2.

Tabel 4.1.3. Realisasi dan Prognosa Neraca Penyediaan dan Kebutuhan Bawang Merah dan Bawang Putih, Januari-Desember 2023

		Ba	wang Merah		Bawang Putih				
Bulan	Total Ketersediaan	Perkiraan Kebutuhan	Perkiraan Neraca Bulanan (Produksi Bersih - Kebutuhan)	Perkiraan Neraca Kumulatif (Surplus/ Defisit)	Total Ketersediaan	Perkiraan Kebutuhan	Perkiraan Neraca Bulanan (Ketersediaan- Kebutuhan)	Perkiraan Neraca Kumulatif (Surplus/ Defisit)	
Stok Akhir	Desember 202	2	80.924					136.440	
Jan-23	120.955	101.891	19.064	99.988	1.482	54.566	-53.084	83.356	
Feb-23	120.251	94.199	26.052	109.042	2.493	49.101	-46.608	32.580	
Mar-23	110.901	101.543	9.358	99.863	75.318	57.527	17.791	48.742	
Apr-23	92.971	100.375	-7.404	75.482	37.570	58.042	-20.472	25.833	
Mai-23	111.690	104.714	6.976	69.626	52.346	55.606	-3.259	21.282	
Jun-23	97.808	98.587	-779	57.011	41.912	53.192	-11.280	8.938	
Jul-23	138.371	98.640	39.730	87.050	59.356	54.407	4.949	13.440	
Agts-23	123.109	90.545	32.564	104.815	87.545	55.576	31.969	44.737	
Sep-23	118.425	91.593	26.832	113.829	76.047	55.399	20.648	63.148	
Okt-23	75.289	103.697	-28.408	66.070	52.906	56.619	-3.713	56.278	
Nov-23	92.132	98.088	-5.956	48.882	76.918	54.078	22.839	76.304	
Des-23	117.838	100.327	17.511	58.083	99.050	55.527	43.523	116.011	
Total 2023	1.319.740	1.184.198	135.541	58.083	662.944	659.641	3.303	116.011	

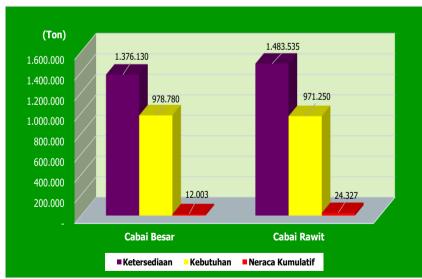
Sumber : BPS, Kemendag, dan Kementan. diolah Badan Pangan Nasional Update 20 Oktober 2023

Tabel 4.1.3. menunjukkan bahwa prognosa neraca bawang merah dalam negeri Januari s.d Desember 2023 surplus sebesar 135,54 ribu ton. Perkiraan neraca bulanan bawang merah selama Januari s.d Desember 2023 hampir di semua bulan mengalami surplus kecuali bulan April, Juni, Oktober dan November mengalami defisit. Surplus terbesar bawang merah Juli 2023 yaitu sebesar 39,73 ribu ton dan terendah terjadi pada bulan Mei sebesar 6,98 ribu ton.

Sementara prognosa neraca bawang putih, ketersediaan bulan Januari s.d Desember 2023 sebesar 96% berasal dari bawang putih impor. Tabel 4.1.3 terlihat neraca bulanan mengalami surplus 3,30 ribu ton kalau ditambah adanya stok akhir Desember 2022 sebesar 136,44 ribu ton sehingga surplus kumulatif 2023 menjadi 116,01 ribu ton. Perkiraan neraca

bulanan bawang putih bulan Januari s.d Desember 2023 terlihat surplus pada bulan Maret, Juli, Agustus, September, November dan Desember dan sebalikanya terjadi defisit pada Januari, Februari, April, Mei, Juni dan Oktober. Surplus terbesar terjadi pada bulan Desember sebesar 43,52 ribu ton dan defisit terbesar pada Januari sebesar 53,08 ribu ton.

Neraca penyediaan dan kebutuhan komoditas lainnya seperti cabai besar dan cabai rawit selama bulan Januari sampai Desember tahun 2023 terlihat mengalami surplus artinya ketersediaan secara nasional hingga akhir tahun 2023 diperkirakan masih aman namun distribusi dan akses untuk sampai ke masyarakat yang harus diperhatikan (Gambar 4.1.2). Ketersediaan cabai besar dan cabai rawit nasional berasal dari produksi siap konsumsi dalam negeri, sedangkan total kebutuhan cabai besar dan cabai rawit nasional dihitung dari kebutuhan rumah tangga (Susenas) dan di luar rumah tangga (industri serta warung dan PKL). Produksi cabai besar terdiri dari cabai merah keriting dan cabai TW, sementara produksi cabai rawit terdiri dari cabai rawit merah dan cabai rawit hijau.



Gambar 4.1.2. Neraca Penyediaan dan Kebutuhan Cabe Besar dan Cabe Rawit, 2023

Neraca penyediaan dan kebutuhan cabai besar dan cabai rawit bulan Januari hingga Desember tahun 2023 mengalami surplus. Karakteristik komoditas cabai yang mudah rusak menyebabkan stok akhir pada setiap bulan mengalami penyusutan 75% dari stok awal bulan sebelumnya. Dengan memperhitungkan stok awal tahun 2023 untuk cabai besar sebesar 16.308 ton dan cabai rawit sebesar 4.006 ton, maka masing-masing mengalami surplus kumulatif pada akhir tahun 2023 sebesar 12.003 ton dan 24.327 ton. Surplus neraca bulanan tertinggi untuk cabai besar dan cabai rawit terjadi pada bulan Februari 2023, masing-masing sebesar 60.430 ton dan 66.050 ton. Surplus cabai tertinggi pada bulan Februari ini dikarenakan produksi cabai yang sedang tinggi pada bulan tersebut, sementara kebutuhan cabai pada bulan tersebut merupakan kebutuhan cabai terendah dibandingkan bulan lainnya tahun 2023. Sementara itu surplus neraca bulanan terendah cabai besar terjadi pada Oktober 2023 sebesar 5.382 ton dan untuk cabai rawit pada November 2023 sebesar 16.060 ton (Tabel 4.1.4).

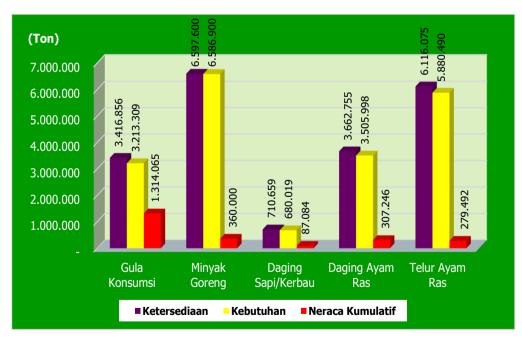
Tabel 4.1.4. Neraca Penyediaan dan Kebutuhan Cabe Besar dan Cabe Rawit, 2023

		Cabai Bes	ar (Ton)	Cabai Rawit (Ton)						
Bulan	Ketersediaan	Kebutuhan	Neraca Bulanan	Neraca Kumulatif	Ketersediaan	Kebutuhan	Neraca Bulanan	Neraca Kumulatif		
Stok Awal Tahun 2023				16.308				4.006		
Jan-23	136.108	82.521	53.586	69.894	124.946	81.766	43.180	47.185		
Feb-23	134.965	74.535	60.430	77.903	139.904	73.853	66.050	77.847		
Mar-23	136.511	84.278	52.233	71.709	135.590	84.021	51.569	71.031		
Apr-23	129.370	83.213	46.157	64.084	144.912	83.758	61.155	78.913		
May-23	125.478	82.521	42.957	58.978	128.967	81.766	47.201	66.929		
Jun-23	122.792	81.536	41.256	56.001	132.194	80.315	51.879	68.611		
Jul-23	119.017	82.521	36.496	50.497	137.167	81.766	55.401	72.553		
Aug-23	109.974	82.521	27.453	40.077	128.280	81.766	46.514	64.653		
Sep-23	87.609	79.859	7.750	17.769	111.604	79.129	32.475	48.639		
Oct-23	87.903	82.521	5.382	9.824	104.431	81.766	22.665	34.824		
Nov-23	96.208	79.859	16.349	18.805	95.189	79.129	16.060	24.767		
Dec-23	90.195	82.894	7.301	12.003	100.350	82.215	18.135	24.327		
<b>Jan-Des 2023</b>	1.376.130	978.780	397.350	12.003	1.483.535	971.250	512.285	24.327		

Sumber: BPS dan Kementan. diolah Badan Pangan Nasional (Update 20 Oktober 2023)

Neraca penyediaan dan kebutuhan komoditas lainnya seperti gula, minyak goreng, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, dan telur ayam ras selama bulan Januari sampai Desember tahun 2023 terlihat mengalami surplus artinya ketersediaan dalam negeri untuk komoditas tersebut diperkirakan terpenuhi sampai akhir tahun 2023 (Gambar 4.1.3).

Ketersediaan gula konsumsi dihitung berdasarkan taksasi produksi giling GKP (Gula Kristal Putih) Tengah tahun 2023 dari tebu dalam negeri dan impor *raw sugar* setara GKP (Gula Kristal Putih). Sementara itu perkiraan total kebutuhan gula sebesar 10,42 kg/kap/tahun, yang dihitung berdasarkan konsumsi rumah tangga (Susenas) dan konsumsi di luar rumah tangga yang terdiri dari kebutuhan Horeka (hotel, restoran, katering) dan lainnya, dengan memperhitungkan adanya penambahan kebutuhan saat hari raya Idul Fitri.



Gambar 4.1.3. Neraca Penyediaan dan Kebutuhan Gula, Minyak Goreng, Daging Sapi, Daging Ayam Ras, dan Telur Ayam Ras, 2023

Tabel 4.1.5 menunjukkan perkiraan neraca gula konsumsi dalam negeri selama bulan Januari sampai Desember tahun 2023 surplus sebesar 203.547 ton, dengan adanya stok awal tahun 2023 sebesar 1.110.517 ton maka surplus kumulatif hingga akhir Desember 2023 menjadi 1,31 juta ton. Meskipun demikian, neraca bulanan gula menunjukkan surplus hanya pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dan Desember. Surplus neraca bulanan gula tertinggi terjadi pada Agustus 2023 sebesar 245.470 ton dan terendah terjadi pada Desember 2023 sebesar 85.403 ton.

Sementara total ketersediaan dan kebutuhan minyak goreng dalam negeri bersumber dari GIMNI (Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia). Perkiraan neraca bulanan minyak goreng selama bulan Januari sampai Desember tahun 2023 secara umum surplus. Surplus neraca bulanan minyak goreng tertinggi terjadi pada April 2023 sebesar 928 ton dan terendah terjadi pada Februari 2023 sebesar 815 ton. Adanya stok minyak goreng di awal Januari tahun 2023 sebesar 349.300 ton menjadikan surplus kumulatif minyak goreng pada akhir tahun 2023 sebesar 360.000 ton.

Tabel 4.1.5. Neraca Penyediaan dan Kebutuhan Gula dan Minyak Goreng, Januari - Desember 2023

		Gula Konsu	msi (Ton)			Minyak Gore	eng (Ton)	
Bulan	Ketersediaan	Kebutuhan	Neraca Bulanan	Neraca Kumulatif	Ketersediaan	Kebutuhan	Neraca Bulanan	Neraca Kumulatif
Stok Awal Tahur	n 2023			1.110.517				349.300
Jan-23	2.115	270.505	-268.390	842.126	556.230	555.327	902	350.202
Feb-23	45.454	244.997	-199.543	642.584	502.401	501.586	815	351.017
Mar-23	113.236	275.359	-162.123	480.461	568.610	567.688	922	351.939
Apr-23	144.582	275.402	-136.220	344.241	572.378	571.450	928	352.867
May-23	401.763	273.959	126.064	470.305	556.230	555.327	902	353.769
Jun-23	439.880	262.496	181.925	652.229	538.556	537.682	873	354.643
Jul-23	489.454	271.509	217.945	870.175	556.230	555.327	902	355.545
Aug-23	516.716	271.246	245.470	1.115.644	556.230	555.327	902	356.447
Sep-23	455.106	262.496	192.610	1.308.254	538.287	537.414	873	357.320
Oct-23	203.887	271.246	-67.360	1.240.894	556.230	555.327	902	358.222
Nov-23	250.264	262.496	-12.232	1.228.662	538.287	537.414	873	359.095
Dec-23	354.400	271.596	85.403	1.314.065	557.934	557.029	905	360.000
Jan-Des 2023	3.416.856	3.213.309	203.547	1.314.065	6.597.600	6.586.900	10.700	360.000

Keterangan : Data Gula Konsumsi bersumber dari Kementan. Kemendag, dan BPS, diolah Badan Pangan Nasional (Update 20 Oktober 2023)

Data Minyak Goreng bersumber dari GIMNI diolah Badan Pangan Nasional (Update 20 Oktober 2023)

Pada Tabel 4.1.6 terlihat stok awal tahun 2023 untuk daging sapi sebesar 56.444 ton, merupakan stok *carry over* akhir Desember 2022 yang berada di *cold storage* importir dan di kandang untuk sapi bakalan setara daging di *feedloter*, sedangkan stok awal tahun 2023 untuk daging ayam ras sebesar 150.489 ton merupakan stok daging ayam beku di *cold storage* pelaku usaha, dan stok awal tahun 2023 untuk telur ayam ras sebesar 43.907 ton.

Perkiraan ketersediaan daging sapi/kerbau dalam negeri berasal dari perkiraan produksi dalam negeri dan rencana impor daging beku sapi/kerbau. Produksi daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras periode Januari-Desember 2023 merupakan angka realisasi dan potensi produksi yang bersumber dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.

Tabel 4.1.6. Neraca Penyediaan dan Kebutuhan Daging Sapi/Kerbau,
Daging Avam Ras dan Telur Avam Ras, Jan-Des 2023

	Daging Ayani Ras dan Telui Ayani Ras, Jan-Des 2023											
	Da	iging Sapi/Ke	erbau (Ton)		Daging	Ayam Ras (T	on)		ī	elur Ayam Ra	as (Ton)	
Bulan	Vataraadiaan	Kahutuhan	Neraca	Neraca	Ketersediaan	Vahutuhan	Neraca	Neraca	Ketersediaan	Vahutuhan	Neraca	Neraca
	Ketersediaan	Reputurian	Bulanan	Kumulatif	Reterseulaan	Nebutunan	Bulanan	Kumulatif	Neter Seulaan	Reputunan	Bulanan	Kumulatif
Stok Awal Tahu	ın 2023			56.444				150.489				43.907
Jan-23	37.168	43.634	-6.466	49.978	305.144	295.046	10.099	160.588	488.999	490.496	-1.497	42.410
Feb-23	39.156	39.411	-255	49.722	266.626	266.493	133	160.721	464.176	443.028	21.148	63.558
Mar-23	50.785	45.872	4.913	54.635	321.313	301.518	19.795	180.516	502.728	523.723	-20.995	42.563
Apr-23	72.001	48.159	23.842	78.478	315.204	306.752	8.452	188.968	534.540	540.495	-5.955	36.609
May-23	49.746	43.634	6.112	84.590	295.243	295.046	197	189.165	506.770	490.496	16.274	52.883
Jun-23	151.789	200.033	-48.245	36.345	288.050	287.336	714	189.879	493.116	475.623	17.493	70.376
Jul-23	68.992	43.634	25.358	61.703	295.243	295.046	197	190.076	510.803	490.496	20.307	90.684
Aug-23	51.059	43.634	7.425	69.128	296.458	295.046	1.412	191.488	516.787	490.496	26.291	116.975
Sep-23	49.910	42.226	7.684	76.813	286.419	285.528	891	192.379	504.211	474.673	29.538	146.513
Oct-23	50.230	43.634	6.596	83.409	304.382	295.046	9.336	201.715	528.050	490.496	37.554	184.067
Nov-23	43.514	42.226	1.287	84.696	337.451	285.528	51.923	253.638	518.938	474.673	44.265	228.332
Dec-23	46.310	43.922	2.388	87.084	351.223	297.615	53.608	307.246	546.957	495.796	51.161	279.492
Jan-Des 2023	710.659	680.019	30.640	87.084	3.662.755	3.505.998	156.757	307.246	6.116.075	5.880.490	235.585	279.492

Keterangan: Data daging sapi bersumber dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan (update 20 Oktober 2023)

Data daging ayam ras dan telur ayam ras bersumber dari Kementan dan BPS, diolah Badan Pangan Nasional (Update 20 Oktober 2023)

Total ketersediaan daging sapi/kerbau tahun 2023 sebesar 710.659 ton sementara kebutuhan 680.019 ton, sehinaga dengan memperhitungkan stok awal tahun 2023 maka surplus kumulatif daging sapi/kerbaru hingga Desember 2023 menjadi sebesar 87.084 ton. Perkiraan neraca bulanan daging sapi selama tahun 2023 mengalami surplus tertinggi pada Juli 2023 sebesar 25.358 ton dan terendah terjadi pada November 2023 sebesar 1.287 ton. Neraca bulanan daging sapi mengalami defisit pada bulan Januari, Februari, dan Juni 2023. Defisit terbesar terjadi pada Juni 2023 yaitu sebesar 48.245 ton, bulan Juni 2023 ini bertepatan dengan adanya hari raya Idul Adha sehingga kebutuhan daging sapi/kerbau pada bulan tersebut juga tertinggi selama tahun 2023 yaitu sebesar 200.033 ton (Tabel 4.1.6).

Perkiraan ketersediaan daging ayam ras dan telur ayam ras berasal dari perkiraan produksi dalam negeri yang bersumber dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Neraca daging ayam ras tahun 2023 mengalami surplus sebesar 156.757 ton, dengan adanya tambahan dari stok awal tahun 2023 sebesar 150.489 ton sehingga surplus kumulatif hingga Desember 2023 menjadi 307.246 ton. Perkiraan neraca bulanan daging ayam ras tahun 2023 terlihat surplus dengan surplus tertinggi pada Desember 2023 sebesar 53.608 ton dan terendah pada Februari 2023 sebesar 133 ton (Tabel 4.1.6).

Neraca telur ayam ras tahun 2023 terlihat surplus sebesar 235.585 ton, dengan adanya tambahan stok awal tahun 2023 sebesar 43.907 ton sehingga surplus kumulatif sampai Desember 2023 menjadi sebesar 279.492 ton. Sebaran neraca bulanannya mengalami defisit pada bulan Januari, Maret, dan April 2023, sementara bulan lainnya mengalami surplus. Surplus neraca bulanan tertinggi untuk telur ayam ras terjadi pada bulan Desember 2023 sebesar 51.161 ton dan terendah terjadi pada Mei 2023 sebesar 16.274 ton (Tabel 4.1.6).

Bila dicermati perkiraan kebutuhan bulanan tertinggi untuk gula, minyak goreng, daging ayam ras, dan telur ayam ras di dalam negeri terjadi pada bulan April 2023, dikarenakan pada bulan tersebut terdapat hari besar keagamaan nasional yaitu hari Raya Idhul Fitri. Perkiraan kebutuhan bulanan tertinggi untuk daging sapi/kerbau selama tahun 2023 terjadi pada bulan Juni 2023, hal ini bertepatan dengan bulan perayaan hari besar keagamaan yaitu hari raya Idul Adha. Sedangkan perkiraan kebutuhan tertinggi untuk cabai besar dan cabai rawit terjadi pada bulan Maret 2023, hal ini bisa jadi dikarenakan bertepatan dengan dimulainya bulan Ramadhan tahun 2023 pada akhir bulan Maret 2023.

## 4.2. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah nilai komposit dari indikator indikator yang digunakan untuk memotret status ketahanan pangan di suatu wilayah. IKP dihitung berdasarkan indikator yang mewakili tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas dan kemaanan pangan. IKP nasional memiliki peran yang sangat strategis untuk mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah kabupaten/kota dan provinsi, serta memberikan gambaran peringkat (ranking) pencapaian ketahanan pangan wilayah kabupaten/kota dan provinsi dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota dan provinsi lain. Selanjutnya IKP diharapkan dapat digunakan sebagai dasar saat melakukan intervensi program sehingga lebih fokus dan tepat sasaran.

Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan tahun 2020 sd 2022 yang dihitung berdasarkan 9 indikator untuk wilayah provinsi dan kabupaten serta 9 indikator untuk wilayah kota dengan bobot yang berbeda dibandingkan wilayah provinsi dan kabupaten. Secara umum wilayah Indonesia bagian barat memiliki nilai IKP lebih baik dibandingkan dengan Indonesia bagian timur. Sepuluh provinsi dengan urutan skor terbaik tahun

2022 adalah Bali (85,19), Jawa Tengah (82,95), Sulawesi Selatan (81,38), Kalimantan Selatan (81,05), DI Yogyakarta (80,88), Gorontalo (80,35), Jawa Timur (79,85), Sumatera Barat (79,45), Lampung (78,61) dan DKI Jakarta (78,25). Dari 10 provinsi tersebut, IKP Lampung memperlihatkan kenaikan selama 3 tahun terakhir. Pada tahun 2020 dan 2021 Lampung belum termasuk 10 provinsi dengan nilai IKP teratas. Namun di tahun 2022 menempati peringkat ke-9. Sedangkan dua provinsi dengan urutan skor terendah, yaitu Papua Barat (45,92) dan Papua (37,80. Skor dan peringkat dan IKP Provinsi secara lengkap dilihat pada Tabel 4.2.1.

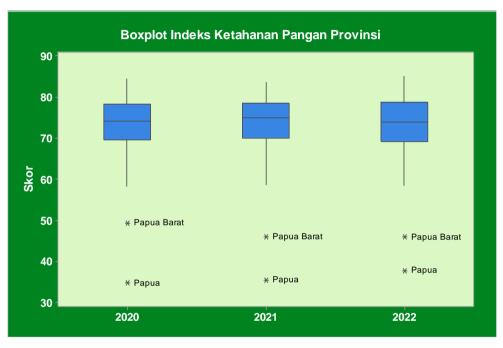
Tabel 4.2.1. Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Provinsi, 2020 - 2022

Peringkat	2020		2021		2022	
reilligkat	Provinsi	Skor	Provinsi	Skor	Provinsi	Skor
1	Bali	84.54	Bali	83.82	Bali	85.19
2	Jawa Tengah	82.31	Jawa Tengah	82.73	Jawa Tengah	82.95
3	Sulawesi Selatan	81.81	DI Yogyakarta	81.43	Sulawesi Selatan	81.38
4	DI Yogyakarta	80.67	Sulawesi Selatan	80.82	Kalimantan Selatan	81.05
5	Gorontalo	80.40	Gorontalo	80.52	DI Yogyakarta	80.88
6	Kalimantan Selatan	80.04	Kalimantan Selatan	80.29	Gorontalo	80.35
7	Jawa Timur	79.90	Jawa Timur	79.70	Jawa Timur	79.85
8	Sumatera Barat	78.64	Sumatera Barat	79.55	Sumatera Barat	79.45
9	Kalimantan Timur	78.24	Sulawesi Utara	78.30	Lampung	78.61
10	DKI Jakarta	77.97	DKI Jakarta	78.01	DKI Jakarta	78.25
÷						
33	Papua Barat	49.40	Papua Barat	46.05	Papua Barat	45.92
34	Papua	34.79	Papua	35.48	Papua	37.80

Sumber: Bapanas

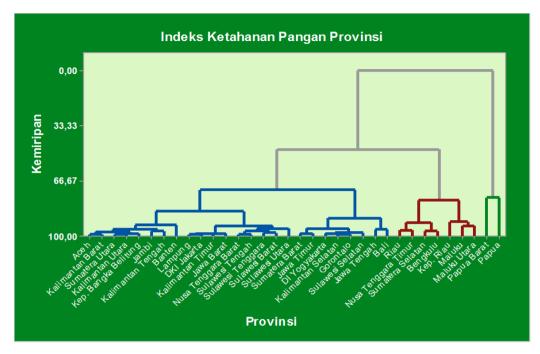
Bila dicermati skor IKP provinsi berdasarkan grafik bloxplot selama tahun 2020-2022, terlihat bahwa Papua Barat dan Papua selalu dianggap sebagai wilayah pencilan karena memiliki skor IKP yang cukup rendah dibandingkan provinsi lainnya. Walaupun berada sebagai pencilan, skor IKP Papua memperlihatkan kemajuan yang ditandai dengan peningkatan skor selama tiga tahun terakhir. Namun untuk Papua Barat justru mengalami

menurunan dari tahu 2020-2022. Hal tersebut menyebabkan gap atau jarak kedua provinsi tersebut menjadi semakin kecil. Wilayah Indonesia bagian timur secara umum memiliki nilai IKP lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia bagian barat, sehingga perlu mendapatkan prioritas penanganan kerentanan pangan yang komprensif (Gambar 4.2.1).



Gambar 4.2.1. Boxplot Skor Indeks Ketahanan Pangan Provinsi, 2020-2022

Hasil pengelompokan provinsi berdasarkan kemiripan skor indeks ketahanan pangan 2020-2022, maka terdapat 5 kelompok. Kelompok 1 atau skor IKP tinggi terdapat 8 (delapan) provinsi, kemudian kelompok 2 atau skor IKP sedang terdapat 17 provinsi, kelompok 3 atau skor IKP rendah terdapat 7 (tujuh) provinsi dan kelompok 4 atau skor IKP sangat rendah terdapat di 2 (dua) provinsi yaitu Papua dan Papua Barat. Secara rinci provinsi masing-masing kelompok dapat dilihat pada Gambar 4.2.2.



Gambar 4.2.2 Pengelompokan Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Berdasarkan Kemiripan, 2020-2022

Berdasarkan peringkat IKP Kabupaten tahun 2022, sepuluh kabupaten dengan urutan skor terbaik adalah Tabanan (92,20), Badung (91,29) dan Gianyar (91,07) merupakan kabupaten yang ada di Provinsi Bali, kemudian dilanjutkan Kabupaten Sukoharjo (89,11), Wonogiri (88,15), Pati (88,01), Sragen (87,53), Karanganyar (87,39), Demak (87,38) dan Grobogan (87,27) di Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2022, Kabupaten Gresik keluar dari 10 kabupaten dengan skor IKP tertinggi sedangakan dua tahun sebelumnya (2020 dan 2021) Gresik berada pada peringkat keenam. Kemudian dua kabupaten dengan urutan skor terendah berada di Provinsi Papua, yaitu Intan Jaya (17,21) dan Nduga (15,66). Peringkat dan skor IKP kabupaten secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 4.2.3 dan Tabel 4.2.2.



Gambar 4.2.3. Sepuluh Peringkat Pertama dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten, 2020 – 2022

Tabel 4.2.2. Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten, 2020 - 2022

Peringkat	2020		2021		2022	
rennykat	Kabupaten		Kabupaten	Skor	Kabupaten	Skor
1	Tabanan	90.05	Tabanan	90.17	Tabanan	92.20
2	Gianyar	89.96	Gianyar	89.46	Badung	91.29
3	Badung	89.29	Badung	89.38	Gianyar	91.07
4	Sukoharjo	88.76	Sukoharjo	88.70	Sukoharjo	89.11
5	Pati	88.25	Pati	88.38	Wonogiri	88.15
6	Gresik	88.02	Gresik	88.25	Pati	88.01
7	Bantaeng	87.38	Minahasa Utara	88.18	Sragen	87.53
8	Karanganyar	87.22	Wonogiri	88.04	Karanganyar	87.39
9	Sidenreng Rappang	87.17	Karanganyar	87.63	Demak	87.38
10	Kudus	86.91	Sragen	87.55	Grobogan	87.27
:						
415	Dogiyai	14.70	Puncak	16.17	Intan Jaya	17.21
416	Puncak	12.63	Nduga	14.89	Nduga	15.66

Sumber: Bapanas

Selanjutnya untuk wilayah perkotaan, sepuluh kota dengan urutan skor terbaik tahun 2022 adalah Denpasar (91,82), Balikpapan (89,47), Salatiga (87,39), Semarang (87,13), Bekasi (86,79), Pekanbaru (86,56), Jakarta Selatan (85,38), Madiun (85,32), Batam (85,23), dan Depok (85,07). Sedangkan dua kota dengan urutan skor terendah yaitu Gunung Sitoli (43,70) dan Subulussalam (23,93) yang termasuk kota sangat rawan pangan. Peringkat dan skor IKP wilayah perkotaan dapat dilihat pada Tabel 4.2.3 dan Gambar 4.2.4.

Tabel 4.2.3. Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Kota, 2020 - 2022

	2020 2022												
Peringkat	2020		2021		2022								
reiligkat	Kota	Skor	Kota	Skor	Kota	Skor							
1	Denpasar	93.32	Denpasar	93.97	Denpasar	91.82							
2	Bukit Tinggi	89.01	Pekanbaru	90.56	Balikpapan	89.47							
3	Balikpapan	87.66	Bukittinggi	88.90	Salatiga	87.39							
4	Banda Aceh	85.32	Balikpapan	88.68	Semarang	87.13							
5	Madiun	85.23	Batam	88.60	Bekasi	86.79							
6	Batam	85.09	Padang	87.73	Pekanbaru	86.56							
7	Jakarta Barat	85.06	Solok	87.45	Jakarta Selatan	85.38							
8	Kendari	84.91	Bontang	87.24	Madiun	85.32							
9	Surabaya	84.71	Ternate	86.74	Batam	85.23							
10	Semarang	84.66	Semarang	86.67	Depok	85.07							
÷													
97	Tual	34.80	Tual	41.83	Gunungsitoli	43.70							
98	Subulussalam	24.53	Subulussalam	27.85	Subulussalam	23.93							

Sumber: Bapanas



Gambar 4.2.4. Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Kota, 2020 - 2022

## 4.3. Global Food Security Index (GFSI)

Secara global, indeks ketahanan pangan negara-negara di dunia tersaji pada angka *Global Food Security Index* (GFSI). Indeks ketahanan pangan tersebut terdiri dari empat indikator yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan akses pangan, kualitas dan keamanan pangan, serta keberlanjutan dan adaptasi. GFSI diukur oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) *New York* yang dirilis setiap September. Indeks ini adalah model perbandingan kuantitatif dan kualitatif yang dinamis, dibangun dari 34 indikator unik pada keempat aspek, yang mengukur pendorong (*drivers*) ketahanan pangan negara berkembang dan maju. GFSI menyajikan peringkat dan skor indeks ketahanan pangan di 113 negara di dunia. Skor

tersebut berkisar antara 0-100, jika skor mendekati 100 maka ketahanan pangannya semakin kuat.

Selama tahun 2018-2022, peringkat terbaik indeks ketahanan pangan Indonesia berdasarkan GFSI adalah pada tahun 2018. Pada tahun tersebut, Indonesia menempati peringkat ke-58 diantara 113 negaranegara di dunia dengan skor indeks ketahanan pangan sebesar 63,6. Namun pada tahun 2022, peringkat Indonesia menurun ke peringkat 63 dengan skor indeks ketahanan pangan yang juga menurun menjadi 60,2. Penurunan peringkat ditahun 2022 tersebut diakibatkan oleh penurunan di tiga indikator indeks ketahanan pangan, utamanya disebabkan penurunan skor kualitas dan keamanan pangan. Peringkat kualitas dan keamanan pangan menurun tujuh poin ke urutan 78 dengan skor 56,2. Indikator selanjutnya yang juga menurun cukup besar adalah ketersediaan pangan, skor tahun 2022 sebesar 50,9 turun dibandingkan tahun 2021 sebesar 57,0 atau secara peringkat turun dari peringkat 61 ke 84. Penurunan tersebut satunya diakibatkan terjadinya perang Rusia-Ukraina salah menyebabkan kenaikan harga pangan dan adanya hambatan politik (political barriers) yang kemudian berpengaruh terhadap ketersediaan bahan pangan. Untuk meningkatkan skor ketersediaan pangan ditahuntahun berikutnya, salah satu tindakan yang dapat dilakukan dengan melakukan diversifikasi bahan pangan, baik pangan lokal maupun pangan impor. Misalnya dengan mengubah ketergantungan Indonesia terhadap impor gandum dari Ukraina menjadi penggunaan komoditas pengganti lainnya yang tersedia di Indonesia.

Indikator keterjangkauan pangan pada tahun 2022 mengalami kenaikan peringkat hingga tujuh poin menjadi peringkat 44 dengan skor 81,4 sedangkan tahun 2021 berada di peringkat 51 atau skor sebesar 78,1. Salah satu hal yang dapat tergambar dari kenaikan skor keterjangkauan pangan adalah adanya perbaikan terhadap akses pangan yang sejalan

dengan perbaikan kondisi masyarakat pasca pandemi covid-19. Selanjutnya adalah indikator keberlanjutan dan adaptasi yang berada pada peringkat ke-83 pada tahun 2022. Walaupun secara peringkat indeks ini mengalami penurunan satu poin dibandingkan tahun 2021 namun skornya meningkat menjadi 46,3 sedangkan tahun 2021 sebesar 45,5. Salah satu upaya untuk meningkatkan skor indikator ini yaitu dengan meningkatkan pemerintah terhadap sektor komitmen pertanian baik dari pembiayaan, penanganan iklim serta memperbaiki dan memperbarui ekosistem pangan yang rusak. Saat ini, Kementerian Pertanian telah melakukan program penyediaan pangan rakyat dalam skala besar, penataan ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah untuk kawasan sentra produksi serta pembangunan sistem logistik, pengolahan dan nilai tambah, distribusi dan pemasaran berbasis digital. Program tersebut dikenal dengan *food estate* yang dikembangkan di beberapa wilayah di Indonesia. Secara rinci peringkat dan skor indeks ketahanan pangan Indonesia berdadarkan Global Food Security Index tahun 2018 sampai 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.3.1 dan Gambar 4.3.1

Tabel 4.3.1. Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Indonesia berdasarkan *Global Food Security Index*, 2018 – 2022

Tahun	Ketersed	iaan	Keterjang	kauan	Kualiatas Keamar		Keberlanju Adapt		Tota	
	Peringkat	Skor	Peringkat	Skor	Peringkat	Skor	Peringkat	Skor	Peringkat	Skor
2018	55	56.5	52	80.8	71	62.8	59	49.5	58	63.6
2019	60	56.9	57	78.2	70	60.5	79	45.2	63	61.5
2020	62	57.2	43	83.3	85	53.9	80	45.5	61	61.6
2021	61	57.0	51	78.1	89	52.9	82	45.5	68	59.8
2022	84	50.9	44	81.4	78	56.2	83	46.3	63	60.2

Sumber : Global Food Security Index

Keterangan: Download per Tanggal 3 Oktober 2023



Gambar 4.3.1. Skor Indeks Ketahanan Pangan Indonesia berdasarkan Global Food Security Index, 2018 – 2022

Selanjutnya bila dilihat perkembangan GFSI negara-negara di dunia, Finlandia adalah negara dengan skor indeks ketahanan pangan tertinggi atau peringkat pertama di dunia dengan skor selama tahun 2018-2022 berkisar antara 82,7 sampai 84,3. Finlandia mampu mempertahankan peringkatnya dari tahun 2021 sebagai negara dengan indeks ketahanan pangan tertinggi di dunia. Selanjutnya peringkat kedua yaitu Irlandia dengan skor indeks ketahanan pangan tahun 2022 sebesar 81,7. Tahun ini Irlandia juga mempertahankan posisinya pada peringkat kedua di dunia. Peringkat berikutnya secara berurutan ditempati oleh Norwegia dengan skor tahun 2022 sebesar 80,5; Prancis (80,2); Belanda (80,1); Jepang (79,5); Kanada (79,1); Swedia (79,1); Inggris (78,8); dan Portugal yang naik 7 peringkat dibandingkan dengan skor sebesar 78,7. Terlihat bahwa sebagian besar negara yang berada pada 10 besar dengan nilai indeks ketahanan tertinggi adalah negara-negara yang ada di Eropa. Salah satu faktor yang menyebabkan banyak negara di Eropa masuk peringkat 10 besar adalah besarnya tingkat pendapatan nasionalnya. Jepang adalah satu-satunya negara di Benua Asia yang termasuk pada peringkat 10 besar sedangkan dari Benua Amerika diwakili oleh Kanada dan Amerika Serikat.

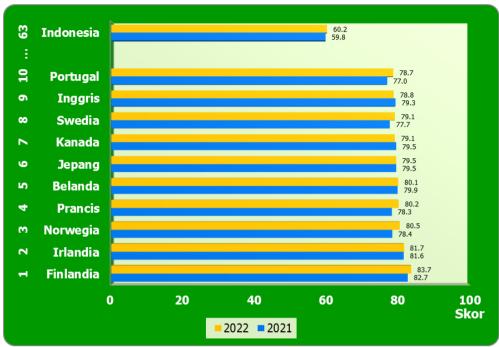
Tahun 2022, Indonesia berada pada peringkat 63 dunia dengan skor indeks ketahanan pangan sebesar 60,2 dan naik 5 peringkat dibandingkan tahun 2021. Selama lima tahun terakhir, skor indeks ketahanan pangan Indonesia tertinggi diperoleh pada tahun 2018 yaitu sebesar 63,6. Secara rinci peringkat dan skor indeks ketahanan pangan negara di dunia dapat dilihat pada Tabel 4.3.2 dan Gambar 4.3.2.

Tabel 4.3.2. Indeks Ketahanan Pangan Negara di Dunia, 2018 - 2022

10001 1.5.2	. Indeks ked	arrarrarr r	arigari .	togala c	ar Darna,	2010	2022
Peringkat	Negara	Ind	Pertumbuhan				
Perniykat	Negara	2018	2019	2020	2021	2022	2021-2022
1	Finlandia	83.8	83.6	84.3	82.7	83.7	$\leftrightarrow$
2	Irlandia	82.4	82.7	82.4	81.6	81.7	$\leftrightarrow$
3	Norwegia	82.3	81.7	80.9	78.4	80.5	<b>▲</b> 5
4	Prancis	78.4	77.9	78.0	78.3	80.2	<b>▲</b> 5
5	Belanda	80.7	80.9	79.5	79.9	80.1	▼2
6	Jepang	79.8	79.7	80.1	79.5	79.5	▼2
7	Kanada	76.1	77.8	77.6	79.5	79.1	<b>▼</b> 3
8	Swedia	80.9	80.4	79.3	77.7	79.1	<b>▲</b> 4
9	Inggris	76.9	78.4	78.8	79.3	78.8	<b>▼</b> 3
10	Portugal	79.2	78.8	79.7	77.0	78.7	<b>▲</b> 7
:							
63	Indonesia	63.6	61.5	61.6	59.8	60.2	<b>▲</b> 5

Sumber : Global Food Security Index

Keterangan : *Download* per Tanggal 3 Oktober 2023 Peringkat berdasarkan tahun 2022



Gambar 4.3.2. Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Negara di Dunia, 2021 -2022

Sementara dilihat lebih rinci per aspek penyusun GFSI, Finlandia yang berada pada peringkat pertama memperoleh nilai tertinggi pada indikator keterjangkauan yaitu sebesar 91,9. Walaupun demikian, berdasarkan peringkat indeks keterjangkauan pangan, Finlandia berada pada peringkat ketujuh di dunia. Peringkat pertama dan kedua yang memperoleh skor tertinggi pada indeks ini adalah Australia dan Singapura, namun tidak termasuk kedalam sepuluh besar negara dengan indeks ketahanan pangan terbesar di dunia. Selanjutnya peringkat ketiga tertinggi untuk indeks keterjangkauan ditempati oleh Belanda dengan skor 92,7. Sedangkan Indonesia berada pada peringkat 44 dengan skor sebesar 81,4. Negara yang berada pada peringkat terakhir adalah Nigeria dengan skor 25,0. Indeks keterjangkauan sangat berhubungan dengan kelaparan. Negaranegara dengan program pengamanan pangan nasional yang tidak komprehensif dan tidak didanai dengan baik memiliki tingkat kelaparan

yang lebih tinggi. Ditambah dengan ketergantungan yang lebih besar pada bantuan pangan. Hal lain yang dapat mempengaruhi skor keterjangkauan adalah volatilitas harga pangan yang besar dan kenaikan biaya.

Tabel 4.3.3. Global Food Security Index Negara di Dunia, 2022

			Ind	eks		Skor
Peringkat	Negara	Keterjangkauan	Ketersediaan	Kualitas dan Keamanan	Keberlanjutan dan Adaptasi	Keseluruhan
1	Finlandia	91.9	70.5	88.4	82.6	83.7
2	Irlandia	92.6	70.5	86.1	75.1	81.7
3	Norwegia	87.2	60.4	86.8	87.4	80.5
4	Prancis	91.3	69.0	87.7	70.3	80.2
5	Belanda	92.7	70.7	84.7	69.2	80.1
6	Jepang	89.8	81.2	77.4	66.1	79.5
7	Kanada	88.3	75.7	89.5	60.1	79.1
8	Swedia	91.9	68.3	85.0	68.3	79.1
9	Inggris	91.5	71.6	77.6	71.1	78.8
10 :	Portugal	90.0	77.0	79.8	64.5	78.7
63 :	Indonesia	81.4	50.9	56.2	46,3	60.2
112	Haiti	32.8	49.6	37.9	34.2	38.5
113	Suriah	32.0	26.6	50.8	38.4	36.3

Sumber: Website Global Food Security Index

Keterangan: Download per Tanggal 3 Oktober 2023

Indeks selanjutnya adalah kualitas dan keamanan pangan, indeks ini sangat terkait dengan kelaparan (menggunakan kekurangan gizi sebagai ukuran) dan *stunting* pada anak-anak. Populasi dengan pola makan yang kurang berkualitas protein dan mikronutriennya dan akses air bersih yang terbatas memperoleh skor yang rendah. Negara yang memiliki skor indeks kualitas dan keamanan pangan terbesar adalah Kanada dengan skor 89,5 kemudian disusul Denmark di peringkat kedua yang memperoleh skor sebesar 89,1. Peringkat selanjutnya ditempati Amerika Serikat (88,8), Belgia (88,4), Finlandia (88,4) dan Prancis (87,7). Indonesia berada di peringkat 78 dengan skor 56,2. Negara yang memiliki skor indeks kualitas dan keamanan pangan sebesar 34,9 dan berada pada peringkat terakhir adalah Madagaskar.

Negara yang menempati peringkat teratas dengan skor indeks ketersediaan tertinggi adalah Jepang dengan skor sebesar 81,2. Selanjutnya adalah Cina dengan skor sebesar 78,4 kemudian Singapura (77,8). Walaupun skor keseluruhan Cina dan Singapura tidak termasuk dalam peringkat sepuluh teratas namun skor indeks ketersediaannya berada diperingkat atas. Negara-negara yang mampu menyediakan komoditas pangan untuk dikonsumsi penduduknya dengan baik memperoleh skor lebih tinggi. Negara yang berada pada peringkat selanjutnya adalah Portugal (77,0); Swiss (76,8); Kanada (75,7); dan Amerika Serikat yang memperoleh skor 73,8. Indeks ketersediaan Finlandia berada pada peringkat 15 dengan skor sebesar 70,5. Peringkat indeks ketersediaan Indonesia menurun 27 peringkat dibandingkan tahun 2021 menjadi pada peringkat 84 dengan skor 50,9. Peringkat terakhir adalah Suriah dengan skor sebesar 26,6.

Indikator terakhir adalah keberlanjutan dan adaptasi. Skor tertinggi sebesar 87,4 diperoleh oleh Norwegia. Peringkat kedua adalah Finlandia dengan skor 82,6 kemudian disusul Irlandia dam New Zealand dengan skor sama yaitu 75,1. Peringkat lima dan enam adalah Republik Ceko (73,3) dan Inggris (71,1). Indonesia memperoleh skor sebesar 46,3 dan berada di peringkat 83 turun satu peringkat dibandingkan tahun 2021. Peringkat terbawah atau ke-113 yang memiliki skor indeks keberlanjutan dan adaptasi terkecil adalah Paraguay sebesar 32,8. Faktor yang sangat mempengaruhi indeks ini untuk saat ini adalah perubahan iklim dan kerusakan alam.

Sementara bila dilihat pada kawasan Asia Pasifik yang mencakup 23 negara, peringkat teratas adalah Jepang dengan skor sebesar 79,5 ditahun 2022. Sebagai negara dengan skor indeks ketahanan pangan terbesar di Asia Pasifik, Jepang juga termasuk kedalam sepuluh negara teratas di dunia yaitu menempati urutan ke-6. Dari tahun 2018 sampai dengan 2022, Jepang mempertahankan peringkatnya pada urutan pertama negara dengan ketahanan pangan yang kuat di Asia Pasifik. Peringkat kedua ditempati oleh New Zealand dengan skor tahun 2022 sebesar 77,8.

Negera-negara selanjutnya yang berada pada peringkat 10 besar adalah Australia dengan skor tahun 2022 sebesar 75,4; Cina (74,2); Singapura (73,1), Kazakhstan (72,1); Korea Selatan (70,2); Malaysia (69,9); Vietnam (67,9); dan Indonesia (60,2).

Terdapat empat negara di Asia Tenggara yang berada pada peringkat 10 besar negara dengan skor indeks ketahanan pangan terbesar di Asia Pasifik yaitu Singapura, Malaysia, Vietnam dan termasuk Indonesia. Indonesia berada pada peringkat ke-10 ditahun 2022 dengan skor indeks ketahanan pangan meningkat dari 59,8 menjadi 60,2. Walaupun Indonesia masuk pada peringkat sepuluh besar, namun angka ketahanan pangannya masih dikatakan belum terlalu tahan sehingga perlu dilakukan upaya lebih lanjut untuk penguatan ketahanan pangan di Indonesia. Selanjutnya negara di Asia Pasifik yang menempati urutan terakhir berdasarkan angka indeks ketahanan pangan tahun 2022 adalah Pakistan dengan skor 52,2 (Tabel 4.3.4).

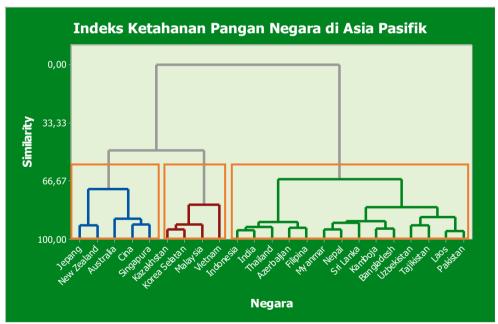
Tabel 4.3.4. Indeks Ketahanan Pangan Negara di Asia Pasifik, 2018 – 2022

Davinglast	Nameur	1	ndeks Keta	ahanan Pai	ngan Globa	ıl e
Peringkat	Negara	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jepang	79.8	79.7	80.1	79.5	79.5
2	New Zealand	77.0	77.6	77.9	77.4	77.8
3	Australia	77.1	75.7	73.8	70.7	75.4
4	Cina	71.6	73.4	70.3	70.6	74.2
5	Singapura	72.4	74.7	74.7	72.8	73.1
6	Kazakhstan	68.2	71.2	71.6	70.7	72.1
7	Korea Selatan	68.4	69.2	70.1	68.9	70.2
8	Malaysia	67.2	68.6	67.9	71.5	69.9
9	Vietnam	67.3	65.6	65.5	62.7	67.9
10	Indonesia	63.6	61.5	61.6	59.8	60.2
:						
23	Pakistan	53.4	54.1	51.4	50.0	52.2

Sumber : Global Food Security Index

Keterangan : *Download* per Tanggal 3 Oktober 2023 Peringkat berdasarkan tahun 2022

Jika indeks ketahanan pangan negara-negara di Asia Pasifik kemiripannya, dikelompokkan berdasarkan maka diperolah bahwa kelompok 1 terdiri dari lima negara, kelompok 2 terdiri dari empat negara dan kelompok 3 empat belas negara. Negara yang termasuk pada kelompok 1 atau negara dengan skor indeks ketahanan pangan besar antara lain Jepang, New Zealand, Australia, Cina dan Singapura. Kelompok 2 tediri dari Kazakhstan, Korea Selatan, Malaysia, dan Vietnam. Kemudian kelompok 3 yaitu negara dengan skor ketahanan pangan kecil terdiri dari Indonesia, India, Thailand, Azerbaijan, Filipina, Myanmar, Nepal, Srilanka, Kamboja, Bangladesh, Uzbekistan, Tajikistan, Laos dan Pakistan (Gambar 4.3.4).



Gambar 4.3.4. Pengelompokan Indeks Ketahanan Pangan Global Negara di Asia Pasifik, 2018 – 2022

Secara keseluruhan, negara di Asia Pasifik yang memiliki skor tertinggi adalah Jepang (79,5). Jika dilihat dari indeks keterjangkauan, peringkat Jepang masih di bawah Australia, Singapura dan New Zealand. Skor keterjangkauan Jepang sebesar 89,8 sedangkan Australia (93,3); Singapura (93,2) dan New Zealand (91,6). Peringkat selanjutnya dibawah Jepang adalah Malaysia (87,0), Cina (86,4), Vietnam (84,0), dan Thailand (83,7). Berikutnya adalah Indonesia yang berada di peringkat sembilan dengan skor 81,4. Skor indeks keterjangkauan Indonesia berada pada peringkat keempat terbesar di Asia Tenggara setelah Singapura, Malaysia, Vietnam dan Thailand.

Pada indeks ketersediaan, peringkat pertama ditempati Jepang dengan skor 81,2. Selanjutnya Cina (79,2), Singapura (77,8), Korea Selatan (71,5), dan Nepal (70,9). Indonesia berada pada urutan terakhir atau 23 dengan skor sebesar 50,9 (Tabel 4.3.5).

Tabel 4.3.5. Global Food Security Index Negara di Asia Pasifik, 2022

			Inde	eks		
Peringkat	Negara	Keterjangkauan	Ketersediaan	Kualitas dan Keamanan	Keberlanjutan dan Adaptasi	Skor Keseluruhan
1	Jepang	89.8	81.2	77.4	66.1	79.5
2	New Zealand	91.6	67.7	73.1	75.1	77.8
3	Australia	93.3	61.1	84.0	58.8	75.4
4	Cina	86.4	79.2	72.0	54.5	74.2
5	Singapura	93.2	77.8	69.7	44.3	73.1
6	Kazakhstan	78.0	67.2	76.3	65.4	72.1
7	Korea Selatan	76.8	71.5	71.5	58.5	70.2
8	Malaysia	87.0	59.5	74.7	53.7	69.9
9	Vietnam	84.0	60.7	70.2	52.2	67.9
10	Indonesia	81.4	50.9	56.2	46.3	60.2
:						
23	Pakistan	59.9	58.3	49.4	37.7	52.2

Sumber: Website Global Food Security Index

Ket : Download per Tanggal 3 Oktober 2023

Peringkat pertama untuk indeks kualitas dan keamanan pangan ditempati oleh Australia dengan skor 84,0. Peringkat selanjutnya adalah Jepang (77,4), Kazakhstan (76,3), Malaysia (74,7), New Zealand (73,1) dan Cina (72,0). Sedangkan Indoensia berada di peringkat 17 yang memperoleh skor sebesar 56,2. Peringkat terakhir ditempati Thailand dengan skor sebesar 45,3.

Untuk indeks keberlanjutan dan adaptasi, Indonesia berada pada peringkat 15 dengan skor sebesar 46,3. Indonesia masih berada diatas Nepal, Srilanka, Azerbaijan, Singapura, Bangladesh, Filipina, Pakistan dan Kamboja. Sedangkan peringkat pertama di Asia Pasifik adalah New Zealand dengan skor 75,1. Upaya yang diperlu dilakukan Indonesia agar bisa meningkatkan skor indeks ini salah satunya dengan memperbarui ekosistem pangan dan upaya untuk memperkecil risiko perubahan iklim.

## **BAB V. KESIMPULAN**

Dari pembahasan analisis di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Aspek ketersediaan mencakup produksi, stok serta keseimbangan antara impor dan ekspor pangan. Berdasarkan data hasil Kerangka Survei Area (KSA) padi oleh BPS tahun 2020 sampai 2022, luas panen padi di Indonesia cenderung menurun sebesar 0,96% per tahun atau menjadi 10,45 juta hektar tahun 2022. Secara umum, puncak panen padi di Indonesia terjadi pada bulan Maret pada tahun 2021 dan 2022. Puncak panen pada Maret 2021 lebih tinggi 1,48% dibandingkan 2022 atau menjadi 1,79 juta ha. Selain pada bulan tersebut, puncak panen kedua terjadi pada Juli untuk tahun 2021 dan 2022 serta Agustus 2020, dan selanjutnya luas panen makin berkurang sampai awal tahun berikutnya.
- 2. Berdasarkan rata-rata produksi padi 2020-2022 sekitar 88% produksi padi Indonesia berada di 12 (duabelas) provinsi, kontribusi 52,07% disumbang dari 3 (tiga) Provinsi di Jawa yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat masing-masing menyumbang 17,86%, 17,38% dan 16,83%. Provinsi berikutnya adalah Sulawesi Selatan dengan kontribusi 9,26%, disusul oleh provinsi Sumatera Selatan (4,93%), Lampung (4,78%), sementara provinsi sentra selanjutnya Sumatera Utara, Aceh, Banten, Sumatera Barat, NTB dan Kalimantan Selatan dengan kontribusi kurang dari 4%.
- 3. Stok pangan merupakan jumlah pangan yang disimpan sebagai cadangan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Berdasarkan hasil Survei Cadangan Beras Nasional (SCBN) tahun 2022 yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian bekerjasama dengan BPS dengan melakukan survei pada 3 periode yaitu 31 Maret, 30 April dan Akhir Juni 2022 dengan jumlah stok beras sebesar 9,11 juta ton (31

Maret), 10,15 juta ton (30 April) dan 9,71 juta ton (akhir Juni 2022). Rata-rata stok beras pada 3 (tiga) periode tersebut sebesar 9,66 juta ton, dengan sebaran stok di rumah tangga (produsen dan konsumen) sebesar 66,84%, disusul di pedagang 11,80%, di Bulog 10,04%, penggilingan 9,01%, horeka dan industri sebesar 2,32%. Stok di rumah tangga utamanya di rumah tangga produsen atau petani mencapai 92% sebagian besar berupa gabah/GKG. Sementara stok beras di pemerintah adalah stok beras yang berada di Bulog yang tersebar di 26 Kantor Wilayah (Kanwil) di seluruh Indonesia. Awal tahun 2020 yakni Januari sd. Februari 2020 rata-rata stok beras berada di atas 1,5 juta ton, selanjutnya terlihat mulai Maret 2020 atau awal terjadinya masa Pandemi Covid-19 di Indonesia sampai dengan saat ini stok beras di Bulog memiliki pola stok pada 1 juta ton s.d bawah 1,5 juta ton dan saat ini posisi tersebut dianggap sebagai stok aman beras di Bulog. Terjadinya penurunan stok di Bulog mulai akhir tahun 2022 menjadikan Indonesia melakukan impor beras sampai akhir tahun 2023 sebesar 2 juta ton.

- 4. Sejalan dengan uraian di atas, terlihat produksi beras dalam negeri kaitannya dengan kebutuhan beras untuk memenuhi konsumsi beras masyarakat yang dihitung berdasarkan nilai Self Sufficiency Ratio (SSR) tahun 2020-2022 mendekati 99% yang berarti sebagian besar kebutuhan beras Indonesia dapat dipenuhi oleh produksi domestik atau Indonesia telah mencapai swasembada beras, dan sebaliknya Import Dependency Ratio (IDR) sangat kecil berkisar 1,01% s.d 1,21%.
- 5. Sementara IDR dan SSR untuk komoditas pangan lainnya tahun 2020-2022, terdapat 2 (dua) komoditas pangan utama yang memiliki nilai ketergantungan impor (IDR) relatif tinggi sekitar 65% 92% yaitu kedelai dan gula yang digunakan untuk bahan baku industri, sedangkan ketergantungan terhadap daging sapi impor sekitar 27% 31%.

- Sementara pemenuhan kebutuhan komoditas seperti jagung (utama sebagai bahan pakan ternak), cabe, bawang merah, daging ayam dan telur ayam dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri yang ditunjukkan dari nilai SSR mendekati 100%.
- 6. Selanjutnya aspek keterjangkaun, berdasarkan data Susenas BPS pengeluaran untuk bahan makanan di wilayah perkotaan dan perdesaan Indonesia tahun 2022 sekitar 50,14% dari total pengeluaran per kapita dalam sebulan ysitu sebesar Rp 665.757,- Pengeluaran ini meningkat 6,89% dari tahun 2021.
- 7. Pengeluaran untuk bahan makanan di perkotaan ini sekitar 20% lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan. Laju pertumbuhan pengeluaran untuk makanan setahun terakhir di wilayah perdesaan cenderung lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Hal ini mengindikasikan inflasi perdesaan yang cenderung lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Pengeluaran untuk makanan di perkotaan cenderung merata untuk semua bahan makanan, sementara di perdesaan pengeluaran untuk makanan cenderung mengelompok menjadi 3 yaitu kelompok atas untuk padi-padian dan rokok, kelompok tengah untuk ikan dan sayuran, dan kelompok bawah untuk daging, telur susu dan buah-buahan.
- 8. DKI Jakarta, Bali dan DI Yogyakarta merupakan provinsi dengan persentase pengeluaran untuk makanan relatif rendah dari total pengeluaran, sebaliknya Papua, Aceh dan Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan persentase pengeluaran untuk makanan paling tinggi sekitar 57%. Namun dari sisi nilai pengeluaran untuk makanan, DKI Jakarta merupakan provinsi tertinggi pengeluaran per kapita sebulan tahun 2022 Rp. 953.321,- atau naik 3,18% dibandingkan tahun 2021 dan terendah di provinsi Nusa Tenggara Timur Rp. 480.749,- atau naik 2,67% dibandingkan tahun 2021.

- 9. Jumlah penduduk miskin tahun 2023 kembali menurun menjadi 25,90 juta orang, jika dibandingkan dengan Maret 2022 jumlah penduduk miskin ini menurun sebanyak 0,26 juta orang. Penurunan kemiskinan ini merupakan bagian dari keberhasilan pemulihan ekonomi pasca pandemi tahun 2021. Perkembangan jumlah penduduk miskin tahun 2019 sampai dengan 2023 cenderung berfluktuatif dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk miskin sebelum pandemi atau pada Maret 2019 sebanyak 25,14 juta orang atau 9,41%. Jumlah penduduk miskin meningkat memasuki tahun pertama pandemi dan mencapai puncaknya pada Maret 2021 sebanyak 27,54 juta orang atau 10,14% dari total penduduk.
- 10. Aspek kualitas dan keamanan pangan, salah satunya dicerminkan dari tingkat konsumsi energi dan protein penduduk Indonesia. Tahun 2020 dan 2021 konsumsi energi telah melebihi standar ideal yaitu lebih dari 2.100 Kal/kap/hari, sementara konsumsi energi tahun 2022 turun menjadi sebesar 2.079 Kkal/kap/hari (99,00%) menunjukan kurang dari ideal, tetapi konsumsi protein sebesar 62,21 gram/kap/hari (109,15%). Masih terdapat beberapa provinsi dengan tingkat konsumsi energi atau protein di bawah standar, tahun 2022 terdapat 23 (dua puluh tiga) provinsi dengan rata-rata konsumsi energi di bawah standar dan 5 (lima) provinsi dengan rata-rata konsumsi protein dibawah standar.
- 11. Pola konsumsi pangan masih belum beragam dan bergizi seimbang, dilihat dari belum tercapainya skor PPH ideal 100. Skor PPH tahun 2021 sebesar 87,2 meningkat menjadi 92,9 pada tahun 2022. Peningkatan ini dipengaruhi oleh kenaikan konsumsi energi dari kelompok kacang-kacangan, sayur dan buah serta kelompok pangan hewani, walaupun kelompok lain mengalami penurunan.

- 12. Berdasarkan data *Prevalence of Undernourishment (PoU)* tahun 2020-2022, menunjukkan bahwa angka PoU Indonesia terlihat meningkat yaitu tahun 2020 sebesar 8,34% meningkat menjadi 8,49% di tahun 2021 dan meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 10,21% dengan status "sedang". Capaian PoU pada tingkat nasional ini juga sejalan dengan capaian di tingkat provinsi. Angka PoU di sebagian besar provinsi di Indonesia secara konsisten mengalami peningkatan pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021.
- 13. Sementara berdasarkan perkembangan kerawanan pangan sedang atau berat (FIES-*Food Insecurity Experianced Scale*) di Indonesia tahun 2020 2022, menunjukan tren penurunan yang berarti persentase penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan guna mencukupi kebutuhan energi sehari-hari makin menurun yaitu tahun 2020 sebesar 5,12% kemudian menurun menjadi 4,79% tahun 2021, namun tahun 2022 meningkat menjadi 4,85%.
- 14. Berdasarkan prognosa neraca beras tahun 2023 *update* data per Oktober 2023. Perkiraan penyediaan beras Indonesia berasal dari perkiraan produksi GKG Januari Desember KSA BPS sebesar 53,63 juta ton dengan total perkiraan produksi beras 30,90 juta ton. Sementara perkiraan total kebutuhan beras 2023 sebesar 30,90 juta ton yang terdiri dari konsumsi langsung dalam rumah tangga sebesar 22,60 juta ton dan konsumsi di luar rumah tangga sebesar 8,29 juta ton. Sehingga tahun 2023 diperkirakan terjadi surplus sebesar 3,51 juta ton, dengan adanya stok akhir Desember 2022 sebesar 4,06 juta ton maka neraca beras kumulatif sd Desember 2023 menjadi 7,57 juta ton.
- 15. Neraca penyediaan dan kebutuhan komoditas lainnya seperti jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabe besar, cabe rawit, gula, minyak goreng, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, dan telur ayam

- ras selama tahun 2023 terlihat mengalami surplus artinya ketersediaan secara nasional aman namun distribusi dan akses untuk sampai ke masyarakat yang harus diperhatikan.
- 16. Secara umum wilayah Indonesia bagian barat memiliki Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang lebih baik dibandingkan dengan Indonesia bagian timur. Sepuluh provinsi dengan urutan skor terbaik tahun 2022 adalah Bali (85,19), Jawa Tengah (82,95), Sulawesi Selatan (81,38), Kalimantan Selatan (81,05), DI Yogyakarta (80,88), Gorontalo (80,35), Jawa Timur (79,85), Sumatera Barat (79,45), Lampung (78,61) dan DKI Jakarta (78,25). Sedangkan dua provinsi dengan urutan skor terendah, yaitu Papua Barat (45,92) dan Papua (37,80).
- 17. Sepuluh kabupaten dengan urutan skor terbaik adalah Tabanan (92,20), Badung (91,29) dan Gianyar (91,07) merupakan kabupaten yang ada di Provinsi Bali, kemudian dilanjutkan Kabupaten Sukoharjo (89,11), Wonogiri (88,15), Pati (88,01), Sragen (87,53), Karanganyar (87,39), Demak (87,38) dan Grobogan (87,27) di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian dua kabupaten dengan urutan skor terendah berada di Provinsi Papua, yaitu Intan Jaya (17,21) dan Nduga (15,66).
- 18. Sepuluh kota dengan urutan skor terbaik tahun 2022 adalah Denpasar (91,82), Balikpapan (89,47), Salatiga (87,39), Semarang (87,13), Bekasi (86,79), Pekanbaru (86,56), Jakarta Selatan (85,38), Madiun (85,32), Batam (85,23), dan Depok (85,07). Sedangkan dua kota dengan urutan skor terendah yaitu Gunung Sitoli (43,70) dan Subulussalam (23,93) yang termasuk kota sangat rawan pangan.
- Selama tahun 2018 2022, peringkat terbaik indeks ketahanan pangan Indonesia berdasarkan GFSI (Global Food Security Index) adalah pada tahun 2018, Indonesia menempati peringkat ke-58 diantara 113 negara – negara di dunia dengan skor indeks ketahanan pangan

- sebesar 63,6. Namun pada tahun 2022, turun 5 peringkat menjadi 63 dengan skor 60,2.
- 20. Penurunan peringkat ditahun 2022 tersebut diakibatkan oleh penurunan di tiga indikator indeks ketahanan pangan, utamanya disebabkan penurunan skor kualitas dan keamanan pangan. Peringkat kualitas dan keamanan pangan menurun tujuh poin ke urutan 78 dengan skor 56,2. Indikator selanjutnya yang juga menurun cukup besar adalah ketersediaan pangan, skor tahun 2022 sebesar 50,9 turun dibandingkan tahun 2020 sebesar 57,0 atau secara peringkat turun dari peringkat 61 ke 84.
- 21. Indeks ketahanan pangan negara negara di Asia Pasifik bila dikelompokan menjadi 3 berdasarkan kemiripannya, yaitu kelompok 1 atau IKP tinggi terdiri dari lima negara antara lain Jepang, Selandia Baru, Australia, Cina dan Singapura, kelompok 2 atau IKP terdiri dari empat negara serta kelompok 3 atau IKP dengan skor katahanan pangan kecil terdiri empat belas negara yaitu Indonesia, India, Thailand, Azerbaijan, Filipina, Myanmar, Nepal, Srilanka, Kamboja, Bangladesh, Uzbekistan, Tajikistan, Laos dan Pakistan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Indonesia. Undang-Undang RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan. Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 227. Kementerian Sekretariat Negara. Jakarta.
- BPS. 2023. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret. Jakarta.
- BPS. 2022. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret. Jakarta.
- BPS. 2021. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret. Jakarta
- BPS. 2020. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2020. Jakarta
- BPS. 2015. Indeks Ketahanan Pangan. https://www.bps.go.id/ news/ 2015/05/06/110/indeks-ketahanan-pangan.html [terhubung berkala]
- Badan Pangan Nasional (BAPANAS), 2022. Direktori Perkembangan Konsumsi Pangan 2018-2022. Jakarta
- Badan Pangan Nasional (BAPANAS), 2022. Indeks Ketahanan Pangan 2022. Jakarta
- Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, 2021. Panduan Prognosa Neraca Pangan Strategis Tahun 2021. Jakarta
- Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, 2019. Situasi Ketahanan Pangan dan Gizi Indonesia Tahun 2019. Jakarta
- Darmawan, Dedy. 2020. CIPS: Akses Pangan di Indonesia Sering Luput dari Perhatian.https://republika.co.id/berita/qlj19c370/cips-akses-pangan-di-indonesia-sering-luput-dari-perhatian [terhubung berkala]

https://app3.pertanian.go.id/eksim

https://impact.economist.com/

